

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KOTA BATU DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan**

**OLEH:
RETNO AJI SETYANINGSIH
NIM. 115120601111003**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KOTA BATU DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Retno Aji Setyaningsih
NIM. 115120601111003

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si
NIK. 2012096704091009



Tia Subekti, S.IP., M.A
NIP. 199206202018032001

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KOTA BATU DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Retno Aji Setyaningsih
NIM: 115120601111003

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif Sarjana Ilmu
Pemerintahan pada tanggal 20 Juli 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji:

Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A
NIK. 2016078805142001

Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A
NIK. 199206202018032001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II:

Dr.Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si
NIK. 2012096704091009

Tia Subekti, S.IP., M.A
NIP. 199206202018032001

Malang, Juli 2018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof.Dr.Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Nama: Retno Aji Setyaningsih

NIM: 115120601111003

Dengan ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2017 adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Beberapa hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya peroleh di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 23 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Retno Aji Setyaningsih
NIM. 115120601111003

KATA PENGANTAR

Segala Puji kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2017)”**. Berbagai pemaparan tentang judul penelitian ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji pada kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan kegiatan yang paling efektif diterapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka sekaligus menjadi faktor terbesar dalam penurunan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dapat ditangani dengan meningkatkan kemampuan penyampaian pesan kepada masyarakat dan terus melakukan evaluasi rutin secara berkala. Inovasi cara penyampaian pesan juga mampu mempengaruhi antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Ilmu Politik, pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya. Penyelesaian tugas akhir ini tidak bisa tidak melibatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini

peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Prof. Dr. Unti Ludigdo Ak, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Joko Purnomo, S.IP., MA Selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, UB, yang banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Terutama kepada dosen pembimbing utama skripsi ini yang begitu luar biasa berjasa bagi peneliti yaitu Ibu Dr. Dra. Alifiuhlatin Utaminingsih, M.Si. Selain itu ucapan terimakasih juga tidak lupa disampaikan kepada Ibu Tia Subekti, S.IP., MA. selaku dosen pembimbing pendamping skripsi ini, yang banyak memberikan masukan dan diskusi yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan segala bentuk dukungan dari keduanya, mustahil skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu bukti kontribusi yang luar biasa dari beliau berdua bagi peneliti. Semoga beliau berdua diberikan panjang umur dan limpahan keberkahan yang terus mengalir.
3. Ucapan terimakasih juga tentunya tidak bisa di lupakan bagi seluruh keluarga besar UB, FISIP, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, terutama angkatan 2011, para teman-teman seperjuangan peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.

4. Terakhir, sebelum peneliti mengakhiri kata pengantar ini, peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Kepada Alm. Prof. Dr. H. Murachman, M.Si. sebagai guru pertama sekaligus penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada seluruh keluarga yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih banyak karena selalu menjadi obor penyemangat peneliti. Menjadi alasan bagi peneliti untuk selalu memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Peneliti menyadari betul atas segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini baik dalam segi penyampaian materi ataupun dalam penulisan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Harapannya semoga karya kecil ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, memberikan pengetahuan baru dan utamanya sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

Wallahulmuwaffiqillaaqwaamiththoriq, Wassalamualaikum Waramatullahi

Wabarakatuh

Malang, 26 Juli 2018

Peneliti

RETNO AJI SETYANINGSIH

ABSTRAK

Retno Aji Setyaningsih, 2018. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Bumiaji Kota Batu tahun 2017. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Tia Subekti, S.IP, MA.

Penggunaan strategi komunikasi oleh lembaga pemerintahan Komisi Pemilihan Umum merupakan senjata ampuh untuk meraih target partisipasi masyarakat yang tinggi. Terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan 4,65% dibandingkan Pemilu pada tahun 2012. Partisipasi masyarakat Kecamatan Bumiaji yang memperoleh angka tertinggi se-Kota Batu mengalahkan dua Kecamatan lainnya dalam partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi 86,3%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu pada tahun 2017, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada masyarakat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik David Kenneth Berlo. Teori tersebut menyatakan bahwa dalam suatu komunikasi politik terdapat empat indikator, yaitu: *source*, *message*, *channel* dan *receiver*. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: kegiatan sosialisasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu di Kecamatan Bumiaji terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keahlian berkomunikasi seluruh panitia pelaksana Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji dapat ditingkatkan bila Komisi Pemilihan Umum mampu memberikan sosialisasi yang lebih merata dan mendalam.

Kata Kunci : *Strategi komunikasi, sosialisasi, partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat.*

ABSTRACT

Retno Aji Setyaningsih, 2018. *Communication Strategy of Regional Electoral Commission of Batu City in the Socialization of the Election of Head of Region in Bumiaji Sub-District, Batu City 2017. Thesis of Governmental Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya.*

Supervisor: Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si and Tia Subekti, S.IP, MA.

The use of communication strategies by government agencies of the General Election Commission is a powerful weapon for achieving high community participation targets. It is proven by the increasing of society participation in Pemilukada year 2017 which increase 4.65% compared to Pemilukada in 2012. Bumiaji Sub-district community participation which got highest number in Batu City beats two other sub-districts in community participation with 86.3% participation rate. This study aims to analyze communication strategy applied by Batu Election General Elections Commission in increasing society participation in Pemilukada year 2017, and also to know what factors becoming supporter and obstacle of communication strategy process conducted by General Election Commission of Batu City to society in 2017. This study used descriptive qualitative method. In this study, the theory used is the theory of political communication David Kenneth Berlo. The theory states that in a political communication there are four indicators; source, message, channel and receiver. Researchers use interviews, documentation and literature in collecting data. The conclusions of this research are: socialization activities implemented by Batu City Electoral Commission in Bumiaji Sub-district proved able to increase community participation through communication skill of all Pemilukada executing committee. The level of community participation in Bumiaji sub-district can be improved if the General Election Commission is able to provide more equitable and deeper socialization.

Keywords : *Communication strategy, socialization, community participation, supporting factors and obstacles.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Akademis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Komunikasi Politik	23
2.2.1 Definisi Komunikasi Politik	23
2.2.2 Teori Komunikasi Politik David Kenneth Berlo	25
2.2.3 Unsur-Unsur Komunikasi Politik	26
2.2.4 Fungsi dan Tujuan Komunikasi Politik	32
2.3 Partisipasi Masyarakat	35
2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	35
2.3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	37
2.4 Alur Pikir Penelitian	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41

3.3	Lokasi Penelitian	41
3.4	Jenis dan Sumber Data	42
3.5	Pemilihan Informan	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6.1	Wawancara	45
3.6.2	Dokumentasi	46
3.6.3	Studi Pustaka	47
3.7	Teknik Analisis Data	47
 BAB IV GAMBARAN UMUM		
4.1	Gambaran Umum Kota Batu	50
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Bumiaji	51
4.3	Gambaran Umum KPU Kota Batu	52
4.3.1	Visi, Misi dan Tujuan KPU Kota Batu	53
4.4	Struktur Organisasi KPU Kota Batu	57
 BAB V PEMBAHASAN		
5.1	Strategi Komunikasi KPU Kota Batu di Kecamatan Bumiaji	58
5.1.1	Pengirim Pesan (<i>Source/Sender</i>)	59
5.1.2	Pesan (<i>Message</i>)	65
5.1.3	Media (<i>Channel</i>)	73
5.1.4	Penerima Pesan (<i>Receiver</i>)	75
5.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	82
5.2.1	Faktor Pendukung	82
5.2.2	Faktor Penghambat	86
 BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	89
6.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2 Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Sebagai Tujuan	36
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara	44
Tabel 5.1 Struktur Pesan Kelompok Sasaran	69



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Alur Pikir Penelitian	39
Bagan 4.1	Bagan Struktur Organisasi	57
Bagan 5.1	Alur Komunikasi Politik David Kenneth Berlo	58
Bagan 5.2	Alur Komunikasi Politik KPU Batu di Kecamatan Bumiaji tahun 2017	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat tahun 2007 - 2017	4
Gambar 1.2	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kota Batu Tahun 2017	6



DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pokok Belanja Daerah, adalah rencana keuangan belanja daerah selama satu tahun yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
APBN	: Anggaran Pokok Belanja Negara, adalah rencana keuangan belanja pemerintah Indonesia selama satu tahun yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
Bimtek	: Bimbingan Teknis. Merupakan agenda rutin dan wajib diselenggarakan oleh pemilu terhadap setiap panitia pelaksanaan pemilu. Ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan, PPK, PPS dan panitia KPPS.
Coklit	: Kegiatan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU terkait jumlah DPT hasil verifikasi dengan pihak dispendukcapil.
Dispendukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Difabel	: Seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.
DPT	: Daftar Pemilih Tetap, adalah individu atau perseorangan yang menggunakan hak pilihnya dalam agenda pemilu.
E-KTP	: Kartu Tanda Pengenal Elektronik. Jenis KTP yang berlaku di Indonesia. Merupakan salah satu syarat untuk memiliki hak pilih dalam pemilu.
Forkompinda	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Golput	: Golongan Putih, individu atau perseorangan yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakannya dalam kegiatan pemilu.
Jingle	: Suatu gambaran dari sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik dan harus terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan apa yang ingin diiklankan atau dipromosikan.
Komunikasi	: Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungannya.
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang berfungsi melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.

KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Panitia penyelenggara pemilu pada tiap-tiap TPS.
KTP	: Kartu Tanda Penduduk, adalah kartu identitas perseorangan resmi yang berfungsi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KPU	: Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu Lembaga Negara, adalah lembaga yang memiliki kinerja bersandingan dengan KPU dan memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap kegiatan yang berlangsung selama kegiatan pemilu.
Pemilukada	: Pemilihan Kepala Daerah, dilaksanakan untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya pada daerah yang bersangkutan.
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan.
PPS	: Panitia Pemungutan Suara.
SDM	: Sumber Daya Manusia.
Sensus Penduduk	: Usaha pengumpulan, pengelolaan, penyajian, penilaian, analisis data tentang jumlah, sifat-sifat kependudukan sosial ekonomis dan sosial budaya dari penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis RI.
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah perangkat pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia.
Sosialisasi	: Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
SPM	: Standar Pelayanan Minimal, adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang memiliki hak dalam bidang pelayanan.
TPS	: Tempat Pemungutan Suara. Tempat berlangsungnya pemilu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan agenda pemilukada serentak di Indonesia merupakan kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Agenda ini bertujuan agar proses pembangunan dapat dilaksanakan secara terfokus, serta masyarakat juga tidak disibukkan dengan pelaksanaan pemilukada yang terus menerus berlangsung pada setiap daerah yang berbeda. Tujuan lain dari kegiatan pemilukada serentak adalah untuk membangun sinergitas tingkat pemerintahan, mulai dari Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pelaksanaan agenda pemilukada di Kota Batu putaran ketiga dilaksanakan pada tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017. Pemilukada serentak juga digelar di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten atau khusus daerah yang akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017. Kegiatan pemilukada ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilukada serentak dilakukan dengan tujuan menghemat anggaran dana daerah dan dinilai lebih efisien bila dibandingkan dengan pemilukada yang dilaksanakan secara terpisah. Berdasarkan studi terdahulu oleh Seknas Fitra¹ di 14 daerah ditemukan pembiayaan pemilukada melalui Anggaran Pokok Belanja Daerah (APBD) memberi peluang besar bagi pelaku di daerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Pelaksanaan pemilukada serentak dilaksanakan untuk

¹ <http://seknasfitra.org> diakses pada tanggal 17 Februari 2018 Pukul 10.15 WIB.

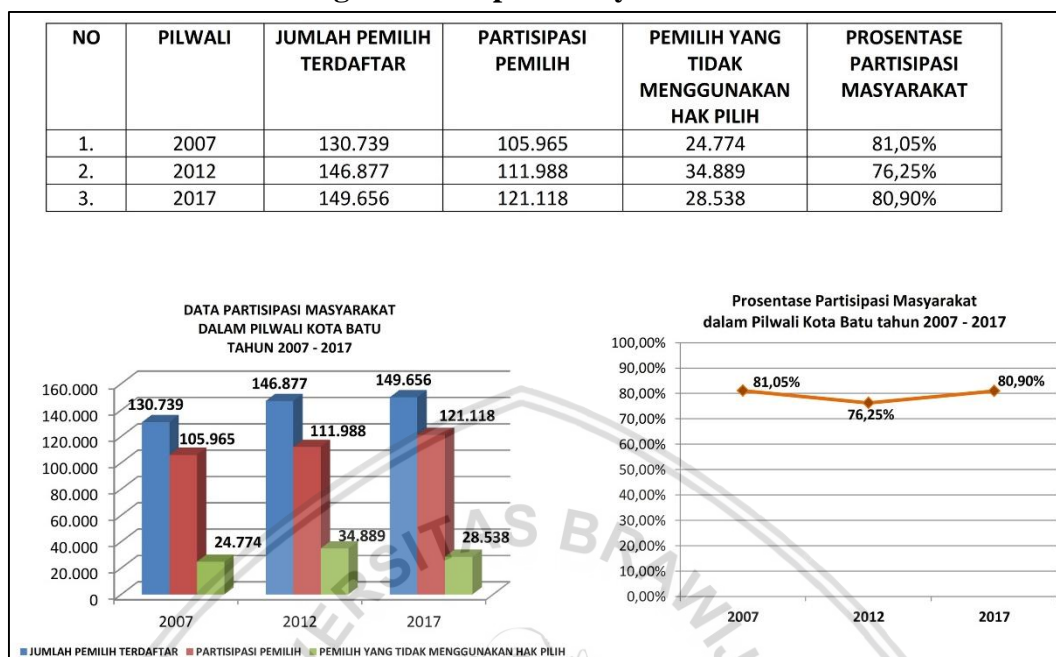
menghindari ketidaksinkronan tahapan pemilukada dengan mekanisme anggaran daerah sehingga dapat memaksimalkan proses pengawasan terhadap setiap alur pelaksanaan pemilukada.

Ketidaksinkronan yang terjadi pada tahapan pemilukada disebabkan oleh daerah-daerah yang belum memiliki alokasi dana untuk anggaran penyelenggaraan pemilukada. Tidak memiliki anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pemilukada sering kali menjadi alasan yang digunakan daerah-daerah tersebut. Alasan tersebut juga tidak dapat dipersalahkan, karena biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilukada secara mandiri pada kabupaten/kota membutuhkan sebanyak 25 miliar rupiah, untuk provinsi membutuhkan sebesar 100 miliar rupiah, dan di Indonesia 17 triliun rupiah. Lain halnya bila melakukan pemilukada serentak, total biaya yang diperlukan menjadi lebih sedikit yaitu 10 triliun rupiah. Oleh karena itu dengan melakukan pemilukada secara serentak diharapkan mampu menekan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah daerah ataupun pusat.

Melakukan pemilukada secara terpisah menyebabkan anggaran yang dibutuhkan selama masa pemilukada dibiayai dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Apabila melakukan kegiatan pemilukada secara serentak, dana yang digunakan dibiayai oleh Anggaran Belanja Pokok Negara (APBN) yang nantinya akan didistribusikan pada masing-masing daerah yang bersangkutan. Hal ini dinilai sangat efisien dari segi biaya serta waktu yang digunakan dalam melakukan seluruh agenda kegiatan selama masa pemilukada berlangsung. Inilah yang mendasari kegiatan pemilukada serentak ini diterapkan di Indonesia dengan tujuan menghemat biaya operasional serta efektifitas waktu.

Apabila Kota Batu tidak mengikuti kegiatan pemilukada serentak 2017 bersama dengan daerah-daerah lainnya, maka dampak terbesar yang timbul akan mempengaruhi APBD Kota Batu. Anggaran yang dapat digunakan untuk sektor pendidikan, pembangunan, dan sebagainya akan terpakai untuk biaya pemilukada. Selain mempengaruhi APBD, tingkat pembangunan Kota Batu juga akan ikut terhambat karena dana yang dapat digunakan untuk pembangunan Kota Batu teralihkan untuk kepentingan pemilukada dalam pemilihan walikota beserta wakilnya. Guna mengantisipasi masalah tersebut diterapkanlah pemilukada serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk meminimalkan dana ekstra yang akan terbuang sia-sia atau terpakai untuk kepentingan yang tidak seharusnya.

Proses pemilukada serentak yang berlangsung di Kota Batu dalam agenda pemilihan walikota dan wakil walikota memerlukan proses yang panjang dan berliku. Sebelum terdaftar sebagai calon peserta resmi dari pemilukada, setiap calon harus melengkapi seluruh persyaratan wajib yang telah ditentukan oleh pihak KPU Kota Batu. Setelah memenuhi seluruh kewajiban dan diresmikan sebagai calon yang sah oleh KPU Kota Batu, setiap calon harus melakukan berbagai macam upaya pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh simpati dan suara dari mereka. Dalam upaya memperoleh simpati masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam kegiatan, KPU Kota Batu juga memiliki andil yang sangat penting. Berbagai macam acara telah dipersiapkan oleh KPU Kota Batu untuk memperoleh simpati masyarakat. Adapun tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Tahun 2007-2017

Sumber: KPU Kota Batu, 2018

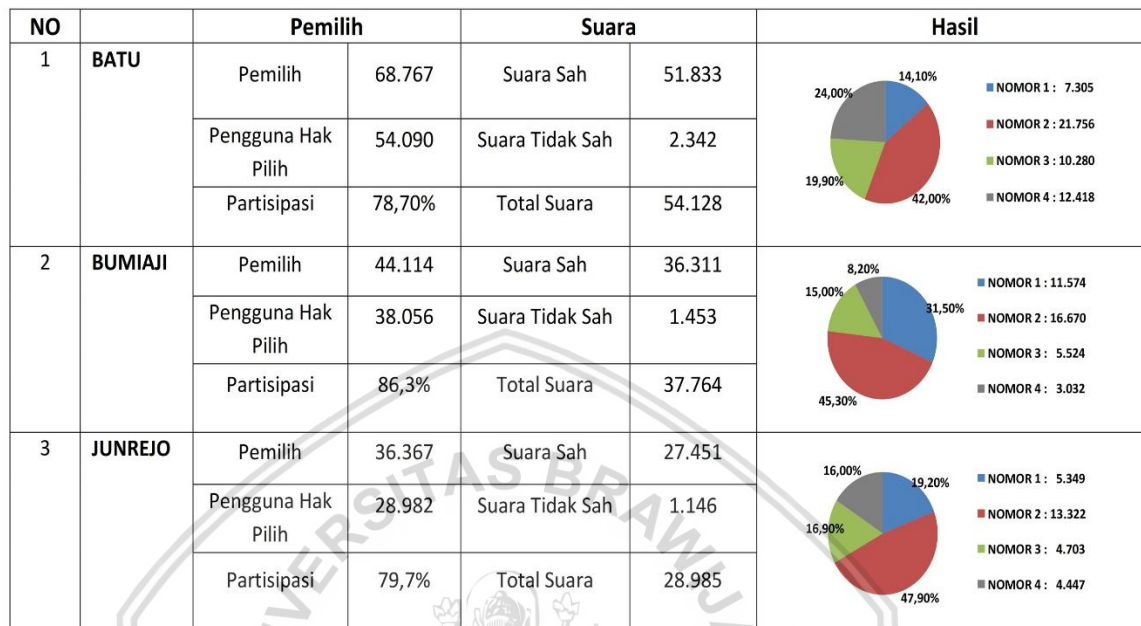
Berdasarkan gambar di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada Kota Batu tahun 2007 sebesar 81,05% merupakan kegiatan pemilukada pertama yang dilakukan oleh KPU serta masyarakat Kota Batu. Pemilukada berikutnya dilaksanakan pada tahun 2012, akan tetapi tingkat partisipasi masyarakatnya turun menjadi 76,25%. Menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi KPU Kota Batu pada pelaksanaan pemilukada tahun 2017, karena tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu menjadi 80,90%. Tidak melebihi tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2007, tetapi mampu meningkatkan partisipasi publik sebanyak 4% sudah merupakan prestasi.

Alasan utama peneliti menggunakan topik ini sebagai penelitian skripsi ini berasal dari data tabel tersebut. Penurunan terhadap tingkat partisipasi politik

sangatlah mudah terjadi, akan tetapi akan sangat sulit dalam meningkatkannya kembali. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu pada tahun 2007 sangat tinggi dikarenakan masih tingginya rasa antusias serta semangat masyarakat dalam proses pemilihan walikota mereka yang pertama kalinya semenjak Kota Batu diresmikan. Akan tetapi, antusiasme masyarakat tidak bertahan lama. Pada proses pemilukada berikutnya pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat partisipasi. Oleh sebab itu, pihak KPU Kota Batu melakukan berbagai macam inovasi serta strategi komunikasi yang baru dalam proses pelaksanaan pemilukada Kota Batu tahun 2017. Hasil yang diperoleh cukup memuaskan, tingkat partisipasi masyarakat meningkat meski tidak sampai melebihi tingkat partisipasi pada tahun 2007.

Agar mampu melakukan penelitian ini dengan lebih baik dan fokus, peneliti mempersempit wilayah penelitian menjadi satu kecamatan. Kecamatan yang menjadi wilayah penelitian adalah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Batu berbeda-beda pada Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak KPU, Kecamatan Bumiaji memiliki presentase tingkat partisipasi masyarakat tertinggi. Dengan jumlah pemilih sebanyak 44.114 orang, sebanyak 38.056 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada Kota Batu tahun 2017. Total suara yang diperoleh sebanyak 37.764 dengan rincian suara sah sebanyak 36.311 dan suara tidak sah sebanyak 1.453. Berdasarkan perhitungan tersebut, Kecamatan Bumiaji memiliki tingkat partisipasi tertinggi apabila dibandingkan dengan kedua kecamatan yang lainnya dengan jumlah presentase sebesar 86,3%. Adapun keterangan lebih rinci dapat dilihat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kota Batu Tahun 2017



Sumber: KPU Batu, 2018.

Data kependudukan yang digunakan oleh KPU Kota Batu terkait jumlah DPT di Kecamatan Bumiaji merupakan data yang sudah melewati tahap verifikasi administrasi data kependudukan yang telah disahkan oleh Kepala dispendukcapil Kota Batu Maulidiono. Proses verifikasi itu sendiri berupa Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan serentak di 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan dan 64.534 desa/kelurahan. Tahapan coklit di KPU Kota Batu dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 8 September sampai 7 Oktober 2016, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi rumah warga Kota Batu untuk memperbaharui data dan daftar pemilih. Setelah dilakukan coklit, PPDP akan memberikan tanda bukti pendaftaran (Model A.A.1-KWK) kepada kepala keluarga/penghuni rumah serta menempelkan stiker (Model AA2) di dinding rumah warga sebagai bukti bahwa PPDP telah memutakhirkan data pemilih di kediaman

warga. Jumlah PPDP Se-Kota Batu berjumlah 420 orang yang berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan sumber data yang dibawa PPDP pada saat mendatangi rumah warga adalah daftar pemilih (Model. A-KWK) yang berisi DPT Pemilu Presiden tahun 2014 serta hasil sinkronisasi DP4 dari Dispendukcapil.

Cara berkomunikasi atau penyampaian pesan yang dirancang dan dilaksanakan oleh KPU Kota Batu untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pemilukada antara lain perlombaan pembuatan maskot dan *jingle* pemilukada dengan hadiah yang cukup menggiurkan dan mampu menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti perlombaan tersebut, dilangsungkannya kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilukada bertujuan untuk memperkenalkan calon kepala daerah serta sebagai sarana untuk menjelaskan persyaratan dan peraturan dari kegiatan pemilukada kepada masyarakat, penerapan strategi jemput bola, dan menghias serta mengadakan agenda hiburan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat agar mereka mau meramaikan acara pemilukada ini dan mendapatkan kepala daerah terbaik bagi masyarakat untuk memimpin daerah mereka dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

Demi memeriahkan acara pemilukada Kota Batu, pihak KPU juga bekerjasama dengan pemerintahan setempat mengundang band kenamaan tanah air “BIAN GINDAS” dalam agenda kegiatan *Launching* Pilwali Kota Batu di Balaikota Among Tani pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2016. Inovasi menarik lain yang menarik perhatian dari peneliti adalah sosialisasi yang diberikan secara

langsung kepada masyarakat difabel beserta dengan orang tua mereka terkait dengan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu pada tanpa harus mengkhawatirkan kekurangan fisik yang dimiliki. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan guna menjaga hubungan komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Apabila komunikasi tidak terjaga dengan baik dengan masyarakat maka dampaknya adalah pencitraan buruk di mata masyarakat, munculnya pendapat serta opini-opini negatif, menurunnya partisipasi politik masyarakat, sosialisasi politik yang terhambat, pendidikan politik yang semakin minim diperoleh masyarakat melalui pemerintah hingga rekrutmen politik yang tidak wajar. Berbagai permasalahan tersebut dapat terjadi apabila komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terjaga dengan baik.

Seluruh agenda yang direncanakan oleh pihak KPU memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat Kota Batu dalam berpartisipasi pada pemilu pada tahun 2017. Sebab, hasil dari pemilu pada Kota Batu tahun 2017 akan mempengaruhi masa depan masyarakat hingga akhir masa periode jabatan lima tahun mendatang. Selain memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat, KPU Kota Batu juga memiliki pertanggungjawaban hasil kinerja di hadapan Panwaslu serta kepada masyarakat umum. Tujuan lain dari pelaksanaan acara-acara tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017.

Seluruh upaya dan inovasi yang dilakukan oleh pihak KPU dengan bantuan pemerintah serta media membuahkan hasil yang menggembirakan. Terbukti dengan adanya peningkatan pada presentase partisipasi masyarakat dalam agenda

pemilukada Kota Batu tahun 2017. Terdapat peningkatan sebesar 4,65% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2012 silam. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa strategi komunikasi apa saja yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat Kota Batu dan mampu menganalisa faktor penghambat serta pendukung proses berjalannya agenda kegiatan pemilukada Kota Batu tahun 2017. Atas dasar tersebut, peneliti memilih judul: “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam materi latar belakang tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu dalam sosialisasi Pemilukada Kota Batu tahun 2017?
- b. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat pada pemilukada Kota Batu tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

- a. Untuk menganalisa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam sosialisasi Pemilukada Kota Batu tahun 2017.
- b. Untuk menganalisa apa saja faktor pendukung dan penghambat proses strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu kepada masyarakat pada pemilukada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki beberapa manfaat dalam penulisan skripsi ini, di mana manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Memperoleh pemahaman baru tentang strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Batu untuk mengembangkan strategi komunikasi yang selama ini diterapkan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi di masa mendatang.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan agar ketika telah mengetahui strategi komunikasi yang telah diupayakan oleh KPU Kota Batu dapat meningkatkan partisipasinya serta mampu mengajak lingkungan sekitarnya

untuk ikut berpartisipasi dalam setiap agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU demi kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kota Batu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai berbagai macam penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan pengantar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan beberapa contoh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai komunikasi politik yang akan disajikan secara ringkas.

Pertama, judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli” oleh Nurali dalam Skripsi Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana KPU Sleman mensosialisasikan pemilihan presiden 2014 kepada komunitas tuli. Konsep dalam penelitian ini menggunakan karya Joeseph A. DeVito, sebagai professor komunikasi di City University of New York yang mengatakan dalam bukunya *Communicology* bahwa komunikasi terdiri atas empat macam yaitu: komunikasi inter pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik dan komunikasi massa. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi menggunakan permainan ular tangga pemilu kepada komunitas tuli terbukti mampu memberikan pengetahuan tentang

pelaksanaan pemilihan presiden, sehingga masyarakat difabel dapat mengetahui dengan pasti siapa, kapan, bagaimana dan mengapa harus memilih.²

Kedua, judul “Strategi Komunikasi pada Humas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan yang Kondusif tahun 2013” oleh Afandi Mu’in Maysagita dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten Magetan dalam upaya menciptakan pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 yang kondusif. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa yang diungkapkan oleh Gabner yang kemudian dipadukan dengan teori komunikasi dan strategi komunikasi. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa dalam menciptakan suasana yang kondusif saat proses pilkada berlangsung, KPUD Kabupaten Magetan melakukan tahap dan proses strategi komunikasi, yaitu: mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi/penggunaan media.³

Ketiga, judul “Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya Menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi Banten 2017” oleh Anita Maryati Dasyo dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

² Nurali. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli*. Skripsi Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015. Diakses melalui digilib.uin-suka.ac.id pada 16/05/2018 pukul 19.46 WIB.

³ Afandi Mu’in Maysagita. *Strategi Komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten Magetan dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan yang Kondusif tahun 2013*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. Diakses melalui <https://ums.ac.id> pada 24/05/2018 pukul 19.46 WIB.

Tirtayasa pada tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penokohan, cara penyampaian kampanye politik, metode sosialisasi, serta sasaran politik dari Mulyadi Jayabaya dalam melakukan komunikasi politik menjelang pemilihan gubernur provinsi Banten tahun 2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik Harold D. Laswell yang didukung dengan beberapa teori serta konsep yang berkaitan. Hasil penelitian dari penelitian ini mampu menjabarkan penokohan, cara penyampaian kampanye politik, metode sosialisasi, serta sasaran politik dari Mulyadi Jayabaya dalam melakukan komunikasi politik menjelang pemilihan Gubernur Provinsi Banten tahun 2017.⁴

Keempat, judul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur” oleh Masleka Pratama Putri dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada tahun 2016 dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah peran sosialisasi pemilu yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori retorika, Laswell, serta interaksional simbolik dalam menjabarkan hasil penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi pemilu KPU melibatkan beberapa elemen

⁴ Anita Maryati Dasyo. *Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya Menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2015. Diakses melalui <https://repository.fisip-untirta.ac.id> pada 24/05/2018 pukul 20.16 WIB.

masyarakat serta pihak-pihak berpengaruh guna memaksimalkan hasil sosialisasi dan menggunakan berbagai media massa dalam menyebarkan segala informasi terkait kegiatan sosialisasi yang sedang dilaksanakan.⁵

Kelima, judul “Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE – Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010)” oleh Erick Wensik Berman Napitupulu dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data analisa mengenai kasus yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori terpilih yang akan digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang digunakan oleh pasangan Hulman-Koni sebagai calon pasangan kepala daerah dalam memenangkan pilukada di Pematangsiantar tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan seluruh strategi yang diterapkan oleh calon kepala daerah beserta tim sukses selama masa kampanye pilukada Pematangsiantar tahun 2010 dengan menggunakan alur dan komponen komunikasi dari Harold D. Laswell sebagai acuan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat lebih menanggapi strategi komunikasi politik dari pasangan hulman Sitorus, SE – Drs. Koni Ismail Siregar yang menggunakan saluran dan media komunikasi untuk

⁵ Maslekeh Pratama Putri. *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2016. Diakses melalui <https://www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id> pada 24/05/2018 pukul 19.46 WIB.

penyampaian pesan-pesan politik, program-program kerja, serta pencitraan pasangan tersebut.⁶

Keenam, judul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015” oleh Nur Antika Agustin Putri dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2015. Penelitian ini menggunakan komponen-komponen strategi komunikasi yang dipadukan dengan prinsip berkomunikasi dalam Al-Qur’an dalam proses penelitian serta pembahasannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi KPU Kabupaten Bantul sukses menurunkan angka golput sebesar 1,27% dan memperoleh predikat kabupaten dengan angka golput terendah di Kecamatan Bantul.⁷

Ketujuh, judul “Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilisasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014” oleh Ridho Satrio Hutomo dalam Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada

⁶ Erick Wensik. *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE – Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010)*. Skripsi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2013. Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id> pada 24/05/2018 pukul 20.34 WIB.

⁷ Nur Antika Agustin Putri. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015*. Skripsi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada 24/05/2018 pukul 21.21 WIB.

tahun 2015 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik suatu partai, khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dari Maswadi Rauf yaitu suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi komunikasi PDI-Perjuangan cukup baik, namun di beberapa sektor masih perlu ditingkatkan yaitu dalam penyampaian pola komunikasi dan cara pendekatan diri kepada masyarakat.⁸

Kedelapan, judul “Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus Kelurahan Giritono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)” oleh Afrina Wahyu Utami dalam Skripsi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 menggunakan metode kualitatif dengan menekankan makna dari generalisasi dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa triangulasi. Tujuan penelitian

⁸ Ridho Satrio Hutomo. *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*. Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2015. Diakses melalui <http://ejournal3.undip.ac.id> pada 27/05/2018 pukul 08.55 WIB.

ini adalah untuk mengetahui peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PPS dan tokoh masyarakat telah berperan dalam melakukan kegiatan sosialisasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, berupa: sosialisasi dan himbauan intensif kepada warga masyarakat kelurahan serta berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT).⁹

Kesembilan, judul “Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi” oleh Erfina Nurussa’adah dan Suwandi Sumartias dalam Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjajaran pada tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi politik partai PKS dalam keterbukaan ideologi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (wawancara dilakukan kepada 5 orang sumber internal dan 4 orang sumber eksternal), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, komunikasi politik yang berlangsung dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS. Selain itu, komunikasi juga melibatkan kader,

⁹ Afrina Wahyu Utami. *Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015*. Skripsi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. Diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id> pada 27/05/2018 pukul 09.12 WIB.

simpatisan, masyarakat Jawa Barat serta tamu undangan komunikannya. bentuk komunikasi politik yang terjadi berupa retorika, propaganda, *public relations*, kampanye politik, serta lobi politik.¹⁰

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teori	Hasil	Perbedaan
1.	Strategi Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli. Nurali, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.	Konsep komunikasi Joseph A. DeVito	Proses pelaksanaan sosialisasi menggunakan permainan ular tangga pemilu kepada komunitas tuli terbukti mampu memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan presiden, sehingga masyarakat difabel dapat mengetahui dengan pasti siapa, kapan, bagaimana dan mengapa harus memilih	Cara penyampaian pesan serta penerima pesan yang berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada penyampaian pesan melalui permainan ular tangga politik dan lebih terfokus pada masyarakat difabel sebagai sasaran sosialisasi.
2.	Strategi Komunikasi pada Humas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan yang Kondusif. Afandi Mu'in Maysagita, Universitas	Teori komunikasi massa Gabner	KPU Kabupaten Magetan melakukan tahap dan proses strategi komunikasi, yaitu: mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi/penggunaan media untuk menciptakan suasana yang kondusif saat proses pilkada berlangsung.	Proses pendekatan kepada masyarakat lebih ditekankan dibandingkan dengan proses penyampaian komunikasi.

¹⁰ Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias. *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi*. Jurnal Kajian Komunikasi, volume 5, No. 1. 2017. Diakses melalui <http://journal.unpad.ac.id> pada 17/12/2018 pukul 13.03 WIB.

	Muhammadiyah Surakarta, 2014.			
3.	Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya Menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi Banten 2017. Anita Maryati Dasyo, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.	Teori komunikasi politik Harold D. Laswell	Mampu menjabarkan penokohan, cara penyampaian kampanye politik, metode sosialisasi, serta sasaran politik dari Mulyadi Jayabaya dalam melakukan komunikasi politik menjelang pemilihan gubernur Provinsi Banten tahun 2017	Lebih terfokus pada tokoh yang akan menyampaikan pesan serta keunggulan yang dimiliki tokoh tersebut guna memperoleh simpati masyarakat.
4.	Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. Maslelah Pratama Putri, Universitas Mulawarman, 2016.	Teori retorika Aristoteles, Teori komunikasi politik Harold D. Laswell, Teori Interaksional Simbolik	Dalam kegiatan sosialisasi pemilu, KPU melibatkan beberapa elemen masyarakat serta pihak-pihak berpengaruh guna memaksimalkan hasil sosialisasi dan menggunakan berbagai media massa dalam menyebarkan segala informasi terkait kegiatan sosialisasi yang sedang dilaksanakan	Lebih memaksimalkan hubungan kerjasama dengan media partner dalam proses sosialisasi.
5.	Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE –	Model komunikasi Harold D. Laswell	Masyarakat lebih menanggapi strategi komunikasi politik dari pasangan hulman Sitorus, SE – Drs. Koni Ismail Siregar yang menggunakan saluran dan media komunikasi untuk penyampaian	Berfokus untuk memaksimalkan komunikasi politik untuk memenangkan pemilu, sedangkan peneliti berfokus memaksimalkan komunikasi politik untuk

	Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010). Erick Wensik, Universitas Sumatra Utara, 2013.		pesan-pesan politik, program-program kerja, serta pencitraan pasangan tersebut	meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
6.	Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015. Nur Antika Agustin Puri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.	Komponen-komponen strategi komunikasi yang dipadukan dengan prinsip berkomunikasi dalam Al-Qur'an	Strategi KPU kabupaten Bantul sukses menurunkan angka golput sebesar 1,27% dan memperoleh predikat kabupaten dengan angka golput terendah di kecamatan Bantul	Lebih banyak bertumpu pada prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadistnya.
7.	Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilisasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014.	Teori komunikasi politik dari Maswadi Rauf	strategi komunikasi PDI-Perjuangan cukup baik, namun di beberapa sektor masih perlu ditingkatkan yaitu dalam penyampaian pola komunikasi dan cara pendekatan diri kepada masyarakat	Lebih terfokus pada tokoh yang akan menyampaikan pesan serta keunggulan yang dimiliki tokoh tersebut guna memperoleh simpati masyarakat.

	Ridho Satrio Hutomo, Universitas Diponegoro, 2015.			
8.	Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri). Afrina Wahyu Utami, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	Model komunikasi Harold D. Laswell	PPS dan tokoh masyarakat telah berperan dalam melakukan kegiatan sosialisasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, berupa: sosialisasi dan himbauan intensif kepada warga masyarakat kelurahan serta berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT)	Lebih terfokus kepada penyempurnaan berkas atau sistem sebelum dilakukannya proses sosialisasi kepada masyarakat.
9.	Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias, Jurnal Kajian	Teori Komunikasi Creswell dan teori komunikasi Harold D. Laswell	komunikasi politik yang berlangsung dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS. Selain itu, komunikasi juga melibatkan kader, simpatisan, masyarakat Jawa Barat serta tamu undangan	Berfokus pada bentuk komunikasi politik yang terjadi selama proses penelitian.

	Komunikasi volume 5, 2017.		komunikannya. bentuk komunikasi politik yang terjadi berupa retorika, propaganda, <i>public relations</i> , kampanye politik, serta lobi politik	
--	----------------------------	--	--	--

Sumber: Olahan penulis, 2018.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini hanya digunakan sebagai informasi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran dan mengembangkan penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik meski dengan fokus yang berbeda. Titik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori dan lokus penelitian. Di mana penelitian yang menjadi fokus peneliti lebih menitik beratkan pada pelaksanaan strategi komunikasi dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu pada Kota Batu 2017.

2.2 Komunikasi Politik

2.2.1 Definisi Komunikasi Politik

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori komunikasi politik. Hal ini dimaksudkan karena peneliti membahas tentang penerapan proses linier atau suatu sistem yang dapat diartikan juga sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan salah satu proses komunikasi yang berorientasi pada kestabilan dan kesinambungan suatu sistem politik.

Konsep dari komunikasi politik adalah bentukan dari dua sub konsep, yaitu sub konsep komunikasi dan subkonsep politik. Kegunaan dari komunikasi politik

itu sendiri adalah untuk mengevaluasi kinerja dari institusional maupun individual sebagai pelaku politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politik. Sebagaimana dikatakan Blumer dan Gurevitch, meskipun berkonotasi fungsionalis, gagasan sistem komunikasi politik merupakan sarana yang heuristic untuk mengkonseptualisasikan lembaga-lembaga berbeda dan aktor-aktor dalam komunikasi politik dan hubungan-hubungan di antara mereka.¹¹

Adapun pengertian dari komunikasi politik menurut Astrid S. Susanto, Ph.D. dalam bukunya mengatakan bahwa:

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.¹²

Makna lain dari komunikasi politik menurut Maswadi Rauf sebagaimana dikutip dalam buku Thomas Tokan Pureklolon mengatakan bahwa:

Komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik juga dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan kegiatan ilmiah.¹³

Pandangan lain dari komunikasi politik menurut Moy, Mazzoleni dan Rojas adalah suatu fenomena yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dan menganggap bahwa fenomena tersebut berfungsi sebagai disiplin akademisi.¹⁴ Komunikasi politik

¹¹ Deddy Mulyana. 2014. *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 7.

¹² Astrid S. Susanto. 1989. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Antar Kota. Hlm. 9.

¹³ Thomas Tokan Pureklolon. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.3.

¹⁴ Moy, P., Mazzoleni, G., and Rojas, H. "On the Dichotomies of Political Communication" In the International Journal of Communication, 6, page 241-246.

memiliki fungsi, pengertian, serta fokus yang berbeda sesuai dengan kondisi politik yang berlangsung pada saat tersebut.

2.2.2 Teori Komunikasi Politik David Kenneth Berlo

Teori komunikasi politik merupakan salah satu bentuk komunikasi, bentuk penyampaian pesan ini berupa pemberian pesan/informasi yang terkait dengan politik dari komunikator (pemberi pesan) ke komunikan (penerima pesan) dalam lingkungan masyarakat dan terjadi dalam sistem politik Indonesia. Untuk membedakan antara komunikasi secara umum dengan komunikasi politik terletak pada fokus masalah yang disampaikan. Komunikasi politik berfokus pada masalah politik, sedangkan komunikasi secara umum membahas komunikasi pada umumnya tanpa harus dibatasi dengan masalah politik.

Teori komunikasi politik itu sendiri terdapat beberapa macam, seperti: teori kepala batu, teori kebutuhan, teori psikoanalitik, teori sifat, teori tipe, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teori komunikasi politik yang dianggap sesuai untuk digunakan adalah teori empati.

Salah satu pakar komunikasi yang David Kenneth Berlo adalah seorang pakar komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat yang meraih gelar doktornya pada usia 29 tahun di Universitas Illinois, pada tahun 1955. Dalam bukunya yang berjudul *the process of communication*, Berlo menggambarkan komunikasi politik dalam model komunikasi SCMR. Dalam model komunikasi tersebut terdapat unsur encoder/pengirim pesan atau decoder/pembaca pesan yang dianggap penting. Menurut Berlo, pengetahuan serta keahlian dari pengirim serta penerima pesan sangat penting guna kelancaran proses komunikasi antara keduanya.

Teori komunikasi yang dikembangkan oleh Berlo biasa disebut sebagai teori empati. Empati merupakan sebuah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain kemudian memproyeksikan diri dalam peranan orang lain. Apabila pengirim serta penerima pesan berada dalam situasi *heterophilous* atau mampu mengantisipasi satu terhadap yang lain, maka kemungkinan komunikasi yang efektif lebih besar terjadi. Jika seseorang dapat melihat bagaimana orang lain merasa dan menyampaikan perasaannya, ada pula kemungkinan yang lebih baik baginya untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada penerima.¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, citra individu, kelompok ataupun lembaga dapat dibangun melalui komunikasi politik. Citra yang muncul melalui komunikasi politik yang diterapkan akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat. Sehingga memudahkan setiap agenda kebijakan ataupun acara yang telah ditentukan sebelumnya dalam upaya komunikasi politik masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Pada tahun 1960, seorang peneliti komunikasi yang bernama David Kenneth Berlo memperkenalkan sebuah istilah SMCR untuk menggambarkan salah satu jenis model komunikasi linier yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dalam model komunikasi SMCR ini, terdapat empat komponen utama yang mendukung terjadinya proses komunikasi politik. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks. Hlm.150.

a. *Sender/source* (sumber atau pengirim pesan)

Sender/source adalah sumber berasalnya pesan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komponen ini adalah sebagai berikut:

- Keterampilan komunikasi (*communication skills*)

Merupakan kemampuan individu, kelompok, ataupun lembaga untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan selama proses komunikasi. Kemampuan yang baik dibutuhkan untuk mempermudah informasi sampai kepada penerima pesan sehingga terjadi komunikasi yang terjadi dapat dikatakan efektif.

- Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan pengetahuan yang dimiliki *sender/source* tentang subyek pesan yang membuat pesan dikomunikasikan memiliki efek yang lebih terhadap masyarakat. Semakin banyak dan mendalam ilmu pengetahuan mengenai subyek yang dimiliki, akan membuat pesan tersampaikan secara lebih efektif oleh komunikator.

- Sistem sosial (*social system*)

Meliputi beberapa aspek sistem sosial dalam mengkomunikasikan pesan seperti nilai-nilai, kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum terkait masyarakat.

- Budaya (*culture*)

Merupakan bagian dari latar belakang masyarakat yang berada dalam sistem sosial. Perbedaan budaya memiliki pengaruh dalam proses penerimaan pesan, oleh karena itu *sender/source* harus

memiliki pengetahuan tentang budaya masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi.

- Sikap (*attitudes*)

Merupakan sikap yang diberikan atau ditunjukkan oleh *sender/source* kepada diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sehingga dapat memberikan perubahan makna dan efek pesan.

b. *Message* (pesan)

Message dalam model komunikasi ini adalah substansi yang dikirimkan oleh *sender/source* kepada penerima pesan. pesan yang dikirimkan oleh *sender/source* dapat berupa suara, teks, video, ataupun media lainnya. Dalam komponen ini, beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

- Isi (*content*)

Merupakan materi dalam pesan yang bertujuan untuk mengekspresikan tujuannya.

- Elemen (*elements*)

Merupakan beberapa hal nonverbal seperti bahasa, gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya.

- Perlakuan (*treatment*)

Merupakan cara pengemasan pesan sebelum dikirimkan kepada penerima pesan serta memberikan efek terhadap umpan balik yang diberikan oleh *receiver*/penerima pesan. Perlakuan yang berlebihan

sangat tidak dianjurkan karena mampu menghambat proses penyampaian pesan selama proses komunikasi berlangsung.

- Struktur (*structure*)

Merujuk kepada struktur pesan yang baik sehingga mampu membuat pesan diterima dengan baik oleh *receiver*/penerima pesan

- Kode (*code*)

Merupakan kode atau bentuk penyampaian pesan yang dikirimkan misalnya bahasa tubuh, gesture, music, dan budaya. Melalui kode, *sender/source* akan mampu memberikan serta menerima pesan secara bersamaan tetapi penggunaan kode yang tidak baik dapat menimbulkan misinterpretasi.

c. *Channel* (saluran komunikasi)

Channel adalah sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan selama proses komunikasi berlangsung. Dalam proses komunikasi secara umum, keefektifan saluran komunikasi dapat dilihat melalui kelima panca indera manusia yang dapat digunakan secara bersamaan yaitu:

- *Seeing*

Melihat, merupakan bentuk penggunaan indera mata untuk melihat pesan yang disampaikan. Dapat pula disebut sebagai komunikasi visual.

- *Hearing*

Mendengarkan, merupakan bentuk penggunaan indera telinga untuk mendengarkan/menerima pesan

- *Touching*

Menyentuh, merupakan bentuk penerimaan pesan melalui sensasi sentuhan melalui indera peraba.

- *Smelling*

Mencium, merupakan saluran penerimaan pesan melalui indera penciuman.

- *Taste*

Merasa, merupakan saluran penerimaan pesan melalui indera pengecap.

d. *Receiver* (penerima pesan)

Receiver adalah penerima pesan atau biasa disebut dengan komunikan. Sasaran komunikasi dari komunikator guna menerima serta mengolah pesan yang diciptakan atau disediakan. Dalam komponen ini, faktor-faktor yang sama dengan *source* yaitu :

- Keterampilan komunikasi (*communication skills*)

Merupakan kemampuan individu, kelompok, ataupun lembaga untuk berkomunikasi dalam menerima dan mengolah pesan selama proses komunikasi. Kemampuan yang baik dibutuhkan untuk mempermudah informasi sampai kepada diri sendiri ataupun

lingkungan sekitar sehingga terjadi komunikasi yang terjadi dapat dikatakan efektif.

- Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan pengetahuan yang dimiliki *receiver* tentang subyek pesan yang mempermudah pemahaman dan penyampaian komunikasi. Semakin banyak dan mendalam ilmu pengetahuan mengenai subyek yang dimiliki, akan membuat pesan tersampaikan secara lebih efektif kepada *receiver*.

- Sistem sosial (*social system*)

Meliputi beberapa aspek sistem sosial dalam mengkomunikasikan pesan seperti nilai-nilai, kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum terkait masyarakat.

- Budaya (*culture*)

Merupakan bagian dari latar belakang masyarakat yang berada dalam sistem sosial. Perbedaan budaya memiliki pengaruh dalam proses penerimaan pesan.

- Sikap (*attitudes*)

Merupakan sikap yang diberikan atau ditunjukkan oleh *receiver* kepada diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sehingga dapat memberikan perubahan makna dan efek pesan.

2.2.4 Fungsi dan Tujuan Komunikasi Politik

2.2.4.1 Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut McNair dalam Cangara¹⁶ memiliki lima dasar fungsi, yaitu:

- Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Fungsi lain dari media komunikasi salah satunya bisa menjadi pengamat dan juga monitoring terhadap kejadian yang menjadi dalam masyarakat.
- Medidik masyarakat terhadap arti dari signifikasi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan mampu melihat fakta yang ada dan membuat liputan yang bersifat objektif (*objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik dan mengembalikan hasil opini itu ke masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Pada kondisi ini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*) sebagaimana pernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam kasus *Watergate*.

¹⁶ Hafied Cangara. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Nusantara. Hlm. 39-40.

- Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan program lembaga politik dapat disalurkan ke media massa.

2.2.4.2 Tujuan Komunikasi Politik

Adapun tujuan-tujuan dari diberlangsungkannya komunikasi politik adalah sebagai berikut:

- Sebagai sosialisasi politik. Menurut Robinson oleh Alexis S. Tan¹⁷ berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar pemahaman terhadap peristiwa politik. Sosialisasi politik merupakan konsep strategis yang sangat mendasar, karena terkait kelangsungan hidup negara dengan seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam saluran interpersonal (keluarga, teman, sahabat, dsb.), saluran organisasi (lembaga pendidikan, ormas, lsm, partai politik, dsb.), dan saluran media massa sebagai sumber informasi dalam melakukan proses sosialisasi politik.
- Sebagai pendidikan politik. Komunikasi politik dianggap sebagai usaha menanamkan, merubah atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan seseorang/kelompok/lembaga berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan umat

¹⁷ Harun, Rochajat dan Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 82.

manusia. Pendidikan politik juga dilakukan dalam berbagai saluran yaitu interpersonal, organisasi dan massa.

- Sebagai partisipasi politik. Sebagai warga negara yang baik, upaya untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka kepada para pejabat publik merupakan suatu hal yang lumrah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu, berkelompok atau melalui lembaga yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Rush dan Philliop Althoff¹⁸ partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan dalam tingkatan politik. Aktivitas ini bisa bergerak dari keterlibatan sampai aktivitas jabatannya.
- Sebagai pendapat umum. Menurut William Albigh¹⁹ pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok, sedangkan Whyte menyebutkan sebagai suatu sikap rakyat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Sehingga bisa dicirikan sebagai (a) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian dan harapan-harapan dari individu, kelompok dalam masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial; (b) hasil interaksi, diskusi, atau penilaian sosial antarindividu berdasarkan pertukaran pikiran secara sadar dan rasional; (c) pendapat umum akan dikembangkan, dirubah dan

¹⁸ Rush & Philip Althoff. 1998. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 121.

¹⁹ Anwar Arifin. 2003. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 116.

dibentuk oleh media massa; (d) bisa dilakukan pada penganut paham demokratis (keterbukaan).

- Sebagai citra politik. Menurut Roberts²⁰ bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, citra (*image*) adalah gambaran seseorang (figur) yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan. Karena citra politik terjalin melalui pikiran dan perasaan secara subjektif yang akan memberikan penilaian dan pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu.

2.3 Partisipasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Partisipasi masyarakat

Terdapat beberapa definisi dari partisipasi masyarakat. Bila dilihat dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Menurut Slamet²¹, partisipasi memiliki peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.

Menurut ahli yang bernama Muller²² dijelaskan bahwa suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 105.

²¹ Y. Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Jurnal ComTech Vol. 4 No. 1. Hlm. 7.

²² Johanness Muller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 256.

segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin. Karena dalam suatu kegiatan partisipasi, dapat dikatakan berhasil apabila terjadi adanya peningkatan peserta yang mengikuti jalannya acara atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan partisipasi sendiri juga terbagi menjadi dua perbandingan, yaitu partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan. Dalam penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan lebih mengarah pada partisipasi sebagai tujuan. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat meningkat pada kegiatan pemilukada 2017. Perbandingan partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Sebagai Tujuan

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> • Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. • Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program. • Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri. • Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. • Partisipasi umumnya jangka pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. • Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. • Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini. • Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang.

<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.
---	---

Sumber: Ife dan Tesoreiro²³

Berdasarkan perbandingan partisipasi di atas, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini lebih condong pada partisipasi sebagai tujuan. Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pembangunan jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang berlangsung selama proses pemilukada Kota Batu di Kecamatan Bumiaji tahun 2017.

2.3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi²⁴, yaitu:

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Kesimpulannya, seseorang dapat dikatakan ikut berpartisipasi dalam suatu agenda kegiatan jika individu/kelompok tersebut benar-benar melibatkan dirinya secara utuh meliputi mental serta emosinya, tidak hanya sekedar hadir dalam kegiatan dan bersikap pasif. Salah satu unsur terjadinya partisipasi adalah

²³ Ife, J dan Tesoriero, F. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 296.

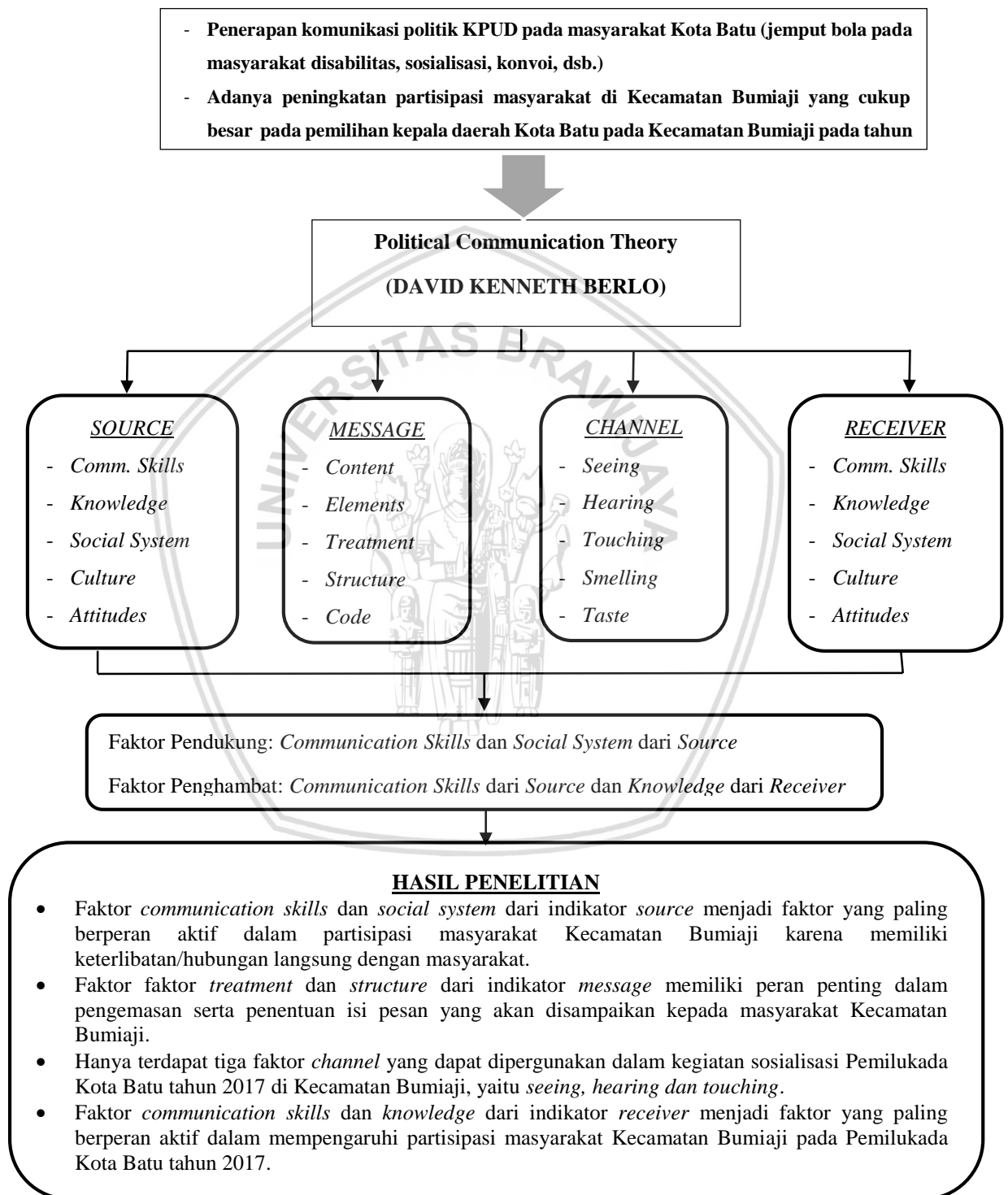
²⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm. 323-324.

timbulnya rasa tanggung jawab dalam menentukan sikap pengambilan keputusan pada saat mengikuti suatu agenda kegiatan partisipasi. Pendapat dari Hicks yang dikutip oleh Hessel menyatakan bahwa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.



2.4 Alur Pikir Penelitian

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menggunakan cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan penelitian.²⁵ Sedangkan dalam penelitian kualitatif terdapat pengertian sebagai kepercayaan, konsep, cara pandang dan asumsi-asumsi terhadap realitas yang diteliti dan cara kerja penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic*), subjektif dan menyeluruh (*holistic*) hingga akhirnya menuntun cara kerja peneliti dan sekaligus menjadi acuan akhir (*ending*).²⁶ Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini adalah agar peneliti mampu menggambarkan secara garis besar maksud serta tujuan dari dilakukannya penelitian ini dan merincikannya sedetail mungkin secara menyeluruh sesuai dengan kejadian asli yang dihadapi selama melakukan penelitian. Diharapkan dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti akan mampu lebih mudah menjabarkan secara rinci seluruh peristiwa serta hasil yang diperoleh selama masa penelitian.

²⁵ Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 59.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian dengan penggunaan teori tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti agar lebih mempermudah peneliti untuk mendapatkan data di lapangan, sehingga peneliti mampu memilah data penting yang diterima serta menyisihkan data yang dianggap kurang penting sesuai dengan kebutuhan. Fokus studi dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu melalui kegiatan sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu pada 2017.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor KPU Kota Batu yang berada di Jl. Raya Tlekung No. 212 Kota Batu Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena seluruh kegiatan pemilu di Kota Batu berpusat pada kantor ini. Seluruh kebijakan serta kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemilu dimulai dari kantor KPU Kota Batu. Jarak antara pusat Kota Batu dengan kantor KPU hanya 6,5 kilometer dan dapat ditempuh sekitar 16 menit. Hal ini memudahkan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu untuk datang ke kantor KPU Kota Batu.

Alasan lain mengapa peneliti memilih tempat ini terkait dengan persoalan komunikasi di mana peran KPU Kota Batu ada sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, partai, calon kepala daerah dan wakilnya, dinas-dinas pemerintahan, dan sebagainya. Sebagian besar komunikasi yang dilakukan selama

masa pemilukada dijembatani oleh KPU Kota Batu, oleh karena itu peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian yang pas dalam penelitian ini.

Selain KPU Batu, lokasi penelitian akan berlangsung di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Peneliti memilih Kecamatan Bumiaji sebagai lokasi penelitian dengan alasan, tingkat presentase partisipasi masyarakat tertinggi ada pada Kecamatan Kecamatan Bumiaji. Pada mulanya peneliti akan melakukan penelitian pada kantor Kecamatan Bumiaji yang berlokasi pada Jl. Sidomulyo No. 17 Kota Batu. Kemudian peneliti akan melanjutkan penelitian ke masing-masing kediaman informan yang berlokasi di sekitar Kecamatan Bumiaji untuk melakukan wawancara lebih lanjut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian kualitatif merupakan data yang diuraikan dalam bentuk kalimat serta penjelasan yang berbentuk uraian. Seluruh data yang telah terkumpul nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan dengan sumber datanya. Sumber data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Definisi dari kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

- **Data Primer**

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, di mana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung.²⁷ Data primer juga seringkali disebut sebagai data utama dari sebuah penelitian, karena karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian ditentukan dari kelengkapan data primer. Data primer yang dalam

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 68

penelitian ini diperoleh dari hasil observasi serta wawancara pada informan yang telah ditentukan.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi.²⁸ Tanpa diperolehnya data sekunder, sebuah penelitian tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi bila dilengkapi dengan adanya data sekunder maka data primer yang semula diperoleh akan mampu diperjelas lebih jauh lagi. Data sekunder yang dimaksudkan dapat berupa data-data hasil dokumentasi terdahulu yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

3.5 Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik sampel *snowball sampling*. *Non-probability sampling* adalah sebuah teknik sampling dengan tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²⁹ Sedangkan teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel di mana peneliti menentukan seorang informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Kemudian memperoleh arahan untuk memperoleh informasi lebih lanjut kepada informan-informan yang lainnya, dan akan terus berlanjut hingga informasi serta data yang dibutuhkan telah

²⁸ Loc. cit.

²⁹ I' anatur Thoirah. 2015. *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani. Hlm.29.

terkumpulkan.³⁰ Di mana informan yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Rochani, S.Pi, M.P.	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu (informan kunci)
2	Pak Heri Sutanto	Ketua PPK Kecamatan Bumiaji (informan utama)
3	Yusuf Irawan	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
4	Riska Ardiyanti	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
5	Yulis Sugiarti	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
6	Syoni Kuncoro	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
7	Suwarno	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
8	Suhartatik	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
9	Elva Andhika Septiasari	Warga Kecamatan Bumiaji (informan utama)
10	Mas Didik	Perwakilan Yayasan Warga difabel (informan utama)
11	Pak Dani – Malang Post	Media cetak (informan utama)
12	Mbak Pungky (Gajahyana TV)	Media televisi lokal (informan utama)
13	Mas Beny (BPS TV)	Media televisi lokal (informan utama)
14	Bu Santi Eliana (Radio Tidar Sakti)	Media radio (informan utama)

Sumber: Olahan peneliti, 2018

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

apabila data dapat dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak bisa didapatkan atau tidak dapat terkumpul, maka sebuah penelitian dapat dikatakan gagal. Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan survey hasil kuisioner. Penjelasan dari teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Pengertian wawancara secara umum adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang terwawancara (*interviewee*). Pengertian lain dari wawancara menurut Esterberg, adalah: *A meeting of two persons to exchange informations and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.*³¹

Pengertian menurut Esterberg tersebut menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu. Melakukan wawancara pada sebuah penelitian juga memerlukan teknik tertentu. Salah satu teknik terpenting adalah bagaimana peneliti menciptakan suasana nyaman bagi pihak yang akan diwawancarai. Pihak terwawancara harus merasa nyaman tanpa ada pengaruh ancaman atau terpaksa untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Pada suatu penelitian kualitatif biasanya terdapat tiga bentuk wawancara yang dapat digunakan, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur,

³¹ *Ibid.*, hlm. 88.

dan wawancara tak-terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bentuk ini dipilih dan digunakan tujuan agar peneliti dapat menggali permasalahan secara terbuka. Karena dalam proses wawancara semi-terstruktur peneliti hanya perlu menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Dari pertanyaan inti tersebut juga masih memiliki kemungkinan untuk berkembang selama proses wawancara berlangsung.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis data yang dapat berupa catatan-catatan, gambar, atau hasil karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resource*), baik foto maupun bahan statistik.³² Untuk jenis-jenis dokumentasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud dari pengumpulan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Karena itu, dokumen pribadi itu dapat berupa harian (*diary book*), surat pribadi (*private letter*), dan otobiografi.
- Dokumen resmi adalah selain dokumen pribadi yang dapat dipilah kepada dokumen *internal* dan dokumen *eksternal*. Dokumen *internal* berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan atau suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan sebagainya. Sedangkan dokumen *eksternal* berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan sebagainya. Dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan, aturan, disiplin dan gaya kepemimpinan seseorang.³³

³² *Ibid.*, hlm. 94.

³³ *Ibid.*, hlm.95.

3.6.3 Studi Pustaka

Studi pustaka memiliki fungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan. Dasar ilmiah ini penting dan harus dipahami sebelum pelaksanaan percobaan berlangsung, karena apa yang kita lakukan adalah penelitian ilmiah, bukan sekedar coba-coba.³⁴ Teknik ini menggunakan peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga dokumen serta buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan dalam proses pengumpulan datanya. Dalam setiap penelitian ilmiah pasti terdapat literatur-literatur dalam penyusunan datanya, maka dari itu kegiatan studi pustaka merupakan salah satu poin penting dalam proses pengumpulan data dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam setiap penelitian pasti terdapat teknik analisis dalam mengolah seluruh data yang diperoleh. Analisis data sendiri adalah keseluruhan upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami data dan menemukan makna yang sistematis pula, rasional dan argumentatif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian dengan baik dan jelas, baik pertanyaan kecil (*minor research*) maupun pertanyaan utama (*major research*).³⁵ Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman mengenai teknik analisis ini, terdiri dari³⁶:

³⁴ Yogi Sugito. 2011. *Metode Penelitian (Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah)*. Malang: UB Press. Hlm 22.

³⁵ Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 107.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses di mana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini dilakukan reduksi atau pengurangan data terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh selama masa pra riset dan kemudian menelaahnya dan memilahnya kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data-data yang telah sesuai dengan topik penelitian disusun secara sistematis, dimasukkan ke dalam proses klarifikasi data. Sedangkan data yang dianggap tidak sesuai akan dipisahkan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah kerja analisis, *display* data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya. Dalam menyajikan data, penulis harus mereduksi kembali data yang telah diolah agar benar-benar bersih dari data-data yang tidak penting guna memaksimalkan hasil penelitian.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*)

Setelah melalui kedua tahap diatas maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan penafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan

akhir penelitian. Oleh karena itu tahapan ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir sebuah penelitian berdasarkan satuan kategorisasi (aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus).



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Batu

Pada awalnya, Kota Batu merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Malang yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993. Hingga pada akhirnya Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kota Malang pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Batu merupakan daerah yang berada di wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur karena sebagian besar jenis tanahnya adalah tanah mekanis yang memiliki banyak kandungan mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi serta memiliki panorama alam yang memukau. Kota Batu sendiri terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius serta memiliki luas wilayah sekitar 202,30km². Sebagian besar keadaan topografi Kota Batu lebih didominasi kawasan dataran tinggi serta perbukitan atau lembah-lembah yang terletak pada dua gunung besar yaitu, Gunung Arjuno-Gunung Welirang dan gunung Butak-gunung Panderman. Sedangkan pada wilayah utara pusat kota terdapat hutan lindung yang sangat lebat, yaitu Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

Berkat kelebihan tersebut, Kota Batu menjadi salah satu wilayah yang paling diimniti oleh masyarakat untuk dikunjungi atau untuk dijadikan lahan bisnis oleh beberapa kalangan. Dibuktikan pada awal abad ke 19, Kota Batu mulai berkembang menjadi salah satu daerah tujuan wisata oleh orang-orang Belanda, sehingga banyak berdiri bangunan peristirahatan (villa) hingga bangunan

perumahan pemukiman orang-orang Belanda. Seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut berubah fungsi menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini. Kekaguman bangsa Belanda terhadap Kota Batu dibuktikan dengan penyetaraan wilayah Batu dengan sebuah Negara di Eropa yaitu Switserlland dan memberikan predikat sebagai De Klein Switserland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

Kota Batu memiliki tiga kecamatan yaitu kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo. Kecamatan Batu merupakan daerah seluas 46,38 km² yang memiliki peran sebagai titik pusat kegiatan dan pemerintahan karena berada di pusat kota, di mana terdapat kantor walikota Batu dan Pemerintah Kota Batu. Kecamatan Junrejo memiliki luas wilayah seluas 26,23 km² dan berbatasan langsung dengan kabupaten Malang. Sedangkan kecamatan Bumiaji memiliki wilayah paling luas sebesar 130,19 km², tetapi sebagian besar wilayahnya berada pada lereng pegunungan Arjuno-Welirang dan dipergunakan untuk pertanian atau perkebunan.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bumiaji

Kecamatan Bumiaji merupakan bagian dari Kota Batu yang memiliki wilayah terluas diantara tiga kecamatan yang ada. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumiaji berada di lereng pegunungan Arjuno-Welirang pada ketinggian rata-rata 1500 meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Bumiaji secara keseluruhan adalah sekitar 127,978 km² atau sekitar 64,28 persen dari total luas Kota Batu. Pada tahun 2016, Kecamatan Bumiaji terbagi menjadi 9 desa, 37 dusun, 83 RW dan 430 RT. Jumlah dusun tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan

dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perampangan wilayah dusun yang terjadi di Desa Gunungsari.

Sektor pertanian Kecamatan Bumiaji merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dalam aksi pembangunan. mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain yang menguntungkan telah diberikan kepada petani guna meningkatkan pendapatan daerah. Dalam struktur perekonomian Kota Batu, sektor pertanian masih mempunyai peranan 898 juta rupiah dan disusul industry non formal sebesar 16 juta rupiah.

4.3 Gambaran Umum KPU Kota Batu

KPU Kota Batu didirikan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota

Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

4.3.1 Visi, Misi dan Tujuan KPU Kota Batu

KPU Kota Batu memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

³⁷ Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, “Visi dan Misi”, diakses melalui <https://kpu-kotabatu.go.id/visi-dan-misi/#misi> pada 2 Juli 2018 pk1. 18.16 WIB.

b. Misi

Adapun misi yang menjadi kewajiban bagi KPU Kota batu adalah sebagai berikut³⁸:

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukasi dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

c. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Batu adalah sebagai berikut³⁹:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

³⁸ Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, loc. cit.

³⁹ Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, loc. cit.

d. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota:

Pada saat kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017 berlangsung, semua divisi akan ikut terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaannya. Tetapi, divisi yang paling berperan aktif dalam proses utama penentuan kebijakan yang akan dilakukan KPU selama proses pemilukada adalah sebagai berikut:

1. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

- Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan rekrutmen kepegawaian di KPU;
- Melaksanakan program diklat dan pengembangan SDM;
- Bertanggung jawab menegakkan kedisiplinan di KPU;
- Melaksanakan kegiatan kampanye;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi;
- Bertanggung jawab atas publikasi dan kehumasan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas bersama Staff

- Bertanggung jawab pada pengumpulan dan penyusunan identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- Bertanggung jawab pada penyusunan dan pencarian bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- Bertanggung jawab pada pengumpulan dan identifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- Bertanggung jawab pada penyusunan draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- Bertanggung jawab pada pengumpulan dan identifikasi informasi pelaksanaan kampanye;

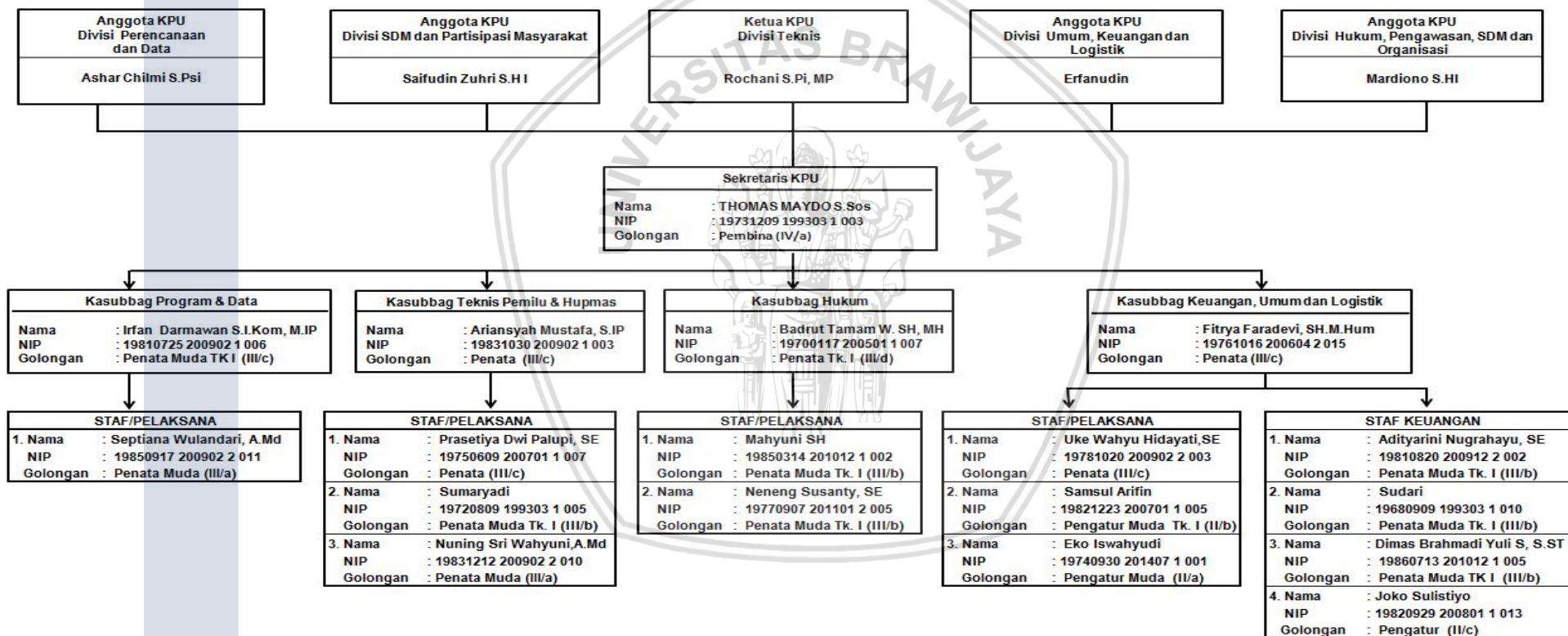
- Bertanggung jawab pada penyusunan draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- Bertanggung jawab pada pengumpulan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- Bertanggung jawab pada proses identifikasi kinerja staf di sub-bagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
- Mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;



4.4 Struktur Organisasi KPU Kota Batu

KPU Kota Batu memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa anggota KPU dan Sekretariat KPU⁴⁰:

Bagan 4.1 Bagan Struktur Organisasi



⁴⁰ Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, “Struktur Organisasi”, diakses melalui <https://kpu-kotabatu.go.id/struktur-organisasi/> pada 3 Juli 2018 pk. 19.10 WIB.



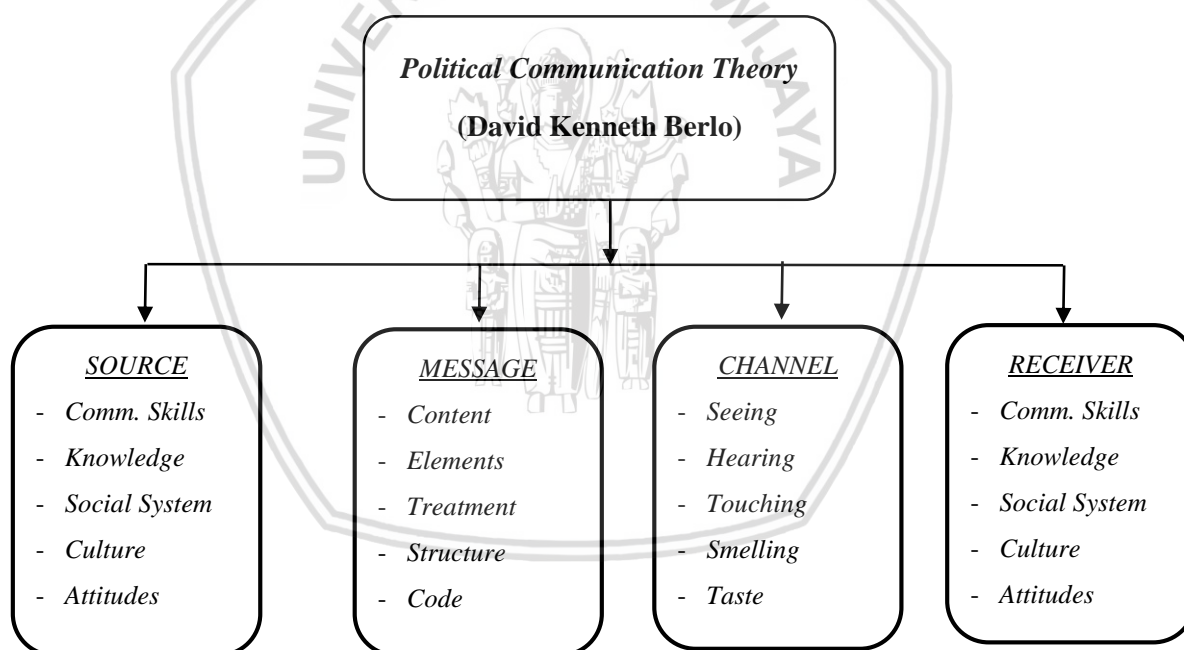
BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Strategi Komunikasi KPU Kota Batu di Kecamatan Bumiaji

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kota Batu di Kecamatan Bumiaji dalam penelitian ini mengikuti alur yang sesuai dengan teori komunikasi politik David Kenneth Berlo. Adapun alur pelaksanaannya dapat dilihat pada Bagan 5.1 berikut:

Bagan 5.1 Alur Komunikasi Politik David K. Berlo



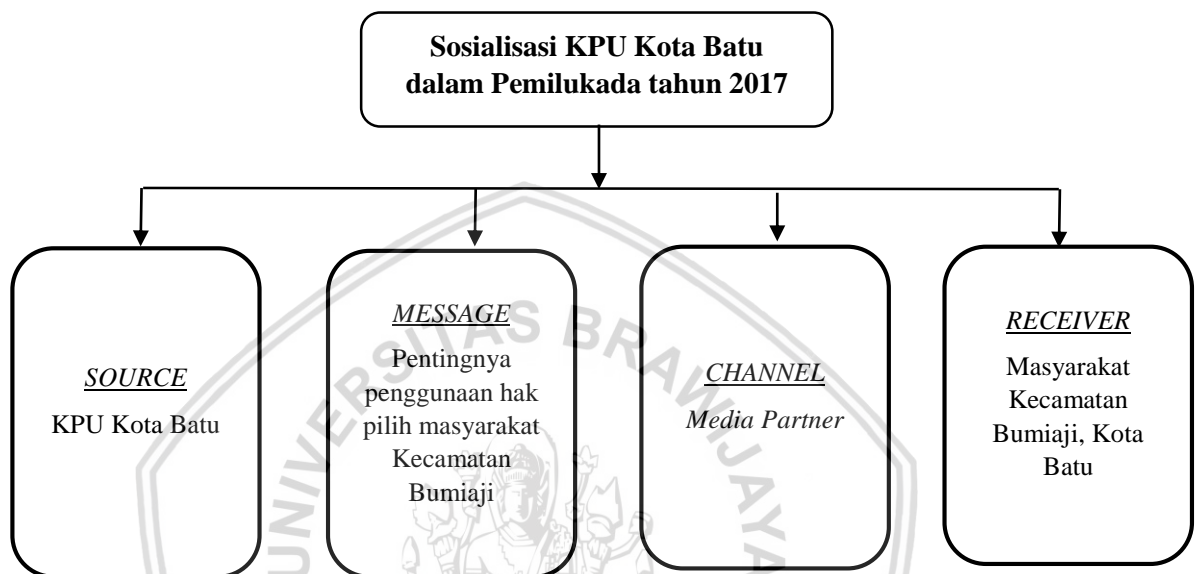
Sumber: Olahan Penulis, 2018

Pada alur komunikasi tersebut, KPU Kota Batu bertindak sebagai *source*. *Message* atau pesan yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat Kota Batu adalah pentingnya penggunaan hak pilih mereka pada Pemilu Kota Batu tahun 2017. Di mana *media partner* yang bekerja sama dengan panitia penyelenggara Pemilu Kota Batu akan bertindak sebagai pengirim isi pesan terkait Pemilu Kota

Batu tahun 2017 kepada masyarakat Kota Batu yang bertindak sebagai *receiver*.

Bagan sederhana dari pemikiran tersebut dapat dilihat pada bagan 5.2 berikut:

Bagan 5.2 Alur Komunikasi Politik KPU Batu di Kecamatan Bumiaji tahun 2017



Sumber: Olahan Penulis, 2018

5.1.1 Pengirim Pesan (*Source/Sender*)

Pengirim pesan/*source* merupakan sumber awal pesan. Pada Pemilu 2017, yang bertindak sebagai *source* adalah KPU Kota Batu, di mana dalam pembuatan pesan tersebut pihak KPU dituntut untuk menguasai faktor-faktor sebagai berikut:

a) Keterampilan Berkomunikasi (*Communication Skills*)

Keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan KPU beserta seluruh kepanitiaan Pemilu Kota Batu (PPK, PPS dan KPPS) dalam merumuskan, menetapkan dan menyampaikan pesan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji. Hal ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang pasti dan konkret terkait pelaksanaan Pemilu Kota Batu.

tahun 2017. Kemampuan berkomunikasi dalam penyampaian pesan kepada masyarakat meliputi:

1. Memiliki keahlian/kemampuan dalam menyampaikan pesan, seperti: kemampuan berorasi, berpidato, persuasif, dll;
2. Mampu menentukan metode penyampaian informasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Mampu memperhitungkan aspek-aspek penting dalam membuat atau melaksanakan suatu acara/agenda kegiatan;
4. Mampu mengkoordinasi berbagai kelompok atau kalangan berbeda yang terlibat dalam suatu acara/agenda kegiatan yang dilaksanakan dengan baik;
5. Mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan bijak selama acara berlangsung dan meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa kekurangan KPU dalam proses penyampaian pesan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah:

1. Tidak memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula.

Terdapat 1 sekolah SMU dan 2 SMK yang dapat digunakan sebagai sasaran sosialisasi pemilih pemula. Akan tetapi, pihak KPU hanya melakukan kegiatan sosialisasi pada sekolah SDN Gunungsari 3. Pihak KPU menyatakan alasan melakukan sosialisasi di SDN 3 Gunungsari tersebut sebagai pendidikan pra pemilu kepada siswa. Kegiatan

sosialisasi yang dilakukan pihak KPU ke SDN Gunungsari 3 dinilai peneliti sangat tidak efisien mengingat usia anak SD masih sangat jauh dari syarat minimal usia calon pemilih pada Pemilu pada Kota Batu tahun 2017. Kegiatan sosialisasi dinilai akan memperoleh hasil yang lebih baik bila dilaksanakan pada SMA/K di Kecamatan Bumiaji.

2. Tidak melaksanakan sosialisasi mendalam pada masyarakat.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Bumiaji tidak mengetahui atau tidak memahami visi dan misi dari calon dan wakil walikota mereka. Pihak KPU terfokus pada tujuan awal mereka, yaitu penggunaan hak pilih masyarakat Kecamatan Bumiaji pada kegiatan Pemilu pada Kota Batu tahun 2017. Sehingga masyarakat memilih berdasarkan pengetahuan umum yang mereka miliki terhadap pasangan calon yang tersedia.

b) Pengetahuan (*Knowledge*)

Sebelum menyampaikan pesan kepada masyarakat, seluruh panitia yang terlibat wajib untuk memahami isi dari pesan yang akan disampaikan terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu guna melatih seluruh anggota yang terlibat dalam kepanitiaan Pemilu ada dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan secara rutin dan berulang kali hingga proses Pemilu berlangsung. Peserta bimbingan teknis yang diselenggarakan KPU meliputi seluruh staff KPU, para pemangku kepentingan di Kota Batu, PPK, dan PPS. Selain melakukan bimtek pada seluruh panitia, pihak KPU juga melakukan evaluasi rutin

setiap hari Senin terhadap seluruh staff yang berada di Kantor KPU Kota Batu guna menghindari adanya permasalahan dalam agenda kegiatan.

c) Sistem Sosial (*Social System*)

Sistem sosial dalam agenda Pemilukada Kota Batu meliputi pembagian struktur kepanitiaan yang jelas dan legal. Istilah legal dalam hal ini dapat diartikan dengan adanya bukti ketetapan dari pemerintah secara resmi terkait *job desk* masing-masing panitia. Hal ini disebabkan karena agenda Pemilukada Kota Batu tahun 2017 merupakan sebuah acara resmi dan rutin dilaksanakan oleh pemerintah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan setiap rincian kegiatan yang terjadi selama acara berlangsung wajib dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, sebelum menjalankan tugas mereka masing-masing seluruh panitia yang terpilih akan mengikuti pelantikan terlebih dahulu sebagai bukti bahwa mereka memiliki hak untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Sistem sosial tidak hanya terjadi dalam struktur kepanitiaan saja, tetapi juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem pemerintahan. Sistem sosial yang terjadi selama Pemilukada Kota Batu terlihat sangat jelas pada hasil pemungutan suara, di mana pasangan Dewanti-Punjul memperoleh dukungan terbanyak dan menjadi pasangan walikota dan wakil walikota di Kota Batu. Berikut merupakan beberapa hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait kemenangan pasangan Dewanti-Punjul di Kota Batu:

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan mas Yusuf, warga Kecamatan Bumiaji sekaligus anggota dari komunitas *Shining Batu* Kota Batu:

“Faktor utamanya ya suaminya mbak, suaminya kan dulu juga walikota Batu. Begitu suaminya turun, istrinya nyalon dan otomatis pihak yang dulunya mendukung suaminya juga ikutan mendukung bu dewanti ini juga. Pak Punjul juga punya latar belakang masyarakat biasa seperti kita-kita. Menurut berita, beliau dulu sempat jadi kernet dan tukang parkir. Tapi masih belum banyak warga yang tahu soal itu, yang paling kelihatan jelas ya Bu Dewanti itu mbak.”³⁹

Pernyataan dari Mas Yusuf tersebut, diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan Bu Yulis sebagai salah satu warga Kecamatan Bumiaji dan beliau menyatakan bahwa: “Dukungannya banyak mbak, di sini kebanyakan pendukungnya partai PDIP dan suaminya kan juga mantan walikota pastinya dukungannya banyak mbak.”⁴⁰

Pernyataan dari Ibu Yulis tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh warga lainnya, yaitu Pak Syoni. Beliau juga ikut memberikan komentar terhadap kemenangan calon pasangan Dewanti dan Punjul melalui pernyataan sebagai berikut:

“Pinter milih pasangan mbak, Bu Dewanti mungkin tahu Pak Punjul berasal dari kalangan menengah ke bawah makanya dijadikan pasangannya. Dibantu suami dan teman-teman suaminya promosi juga makin nambah perhatian masyarakat pastinya. Soalnya dulu suaminya juga jadi orang penting di Batu.”⁴¹

Pernyataan lain terkait kemenangan dari pasangan Dewanti dan Punjul diberikan oleh Mbak Riska sebagai salah satu warga Kecamatan

³⁹ Hasil Wawancara oleh Yusuf Irawan Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018.

⁴⁰ Hasil Wawancara oleh Bu Yulis Sugiarti Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018.

⁴¹ Hasil Wawancara oleh Pak Syoni Kuncoro Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018.

Bumiaji yang ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota Kota Batu tahun 2017. Adapun komentar yang diberikan oleh Mbak Riska adalah: “Mungkin karena dibantu suaminya mbak, Pak Eddy (walikota Batu periode sebelumnya) kan suaminya Bu Dewanti.”⁴²

d) Budaya (*Culture*)

Dalam menyampaikan pesan, KPU Kota Batu beserta seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilu harus diwajibkan untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat/lingkungan terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti budaya yang ada di masyarakat dan menyesuaikannya dengan metode penyampaian pesan yang akan dilakukan. Sebagai contoh di Kecamatan Bumiaji, masyarakat di Kecamatan Bumiaji cenderung menyukai kreasi/seni tradisional maka dalam upaya penyampaian pesan yang diterapkan oleh KPU Kota Batu adalah melakukan sosialisasi disertai dengan musik tradisional gamelan untuk memperoleh perhatian/simpati masyarakat.

e) Sikap (*Attitudes*)

Proses penyampaian pesan yang disertai sikap yang baik akan mampu menarik perhatian masyarakat. Sikap dalam menyampaikan pesan dengan baik dapat berupa: murah senyum, tidak memaksa, ramah, sabar, dan sebagainya. Apabila sikap dari panitia dinilai tidak baik oleh masyarakat/*receiver*, maka pesan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tidak akan pernah diterima. Apabila masyarakat sudah menolak

⁴² Hasil Wawancara oleh Mbak Riska Ardiyanti Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018.

untuk menerima pesan yang diberikan, maka agenda/acara yang sedang berlangsung tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

5.1.2 Pesan (*Message*)

Merupakan pesan yang dirumuskan oleh KPU Kota Batu dan akan disampaikan pada masyarakat Kecamatan Bumiaji melalui media. Adapun aspek-aspek yang harus terdapat dalam pesan sebelum disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji adalah sebagai berikut:

a) Isi (*Content*)

Isi pokok dari pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji adalah pentingnya penggunaan hak pilih mereka pada Pemilu Kota Batu tahun 2017. Penggunaan hak pilih masyarakat pada saat pemilu dianggap penting karena, hasil akhir dari pemilu tersebut tidak hanya berdampak pada perseorangan melainkan berdampak pada seluruh kalangan yang berada pada wilayah yang sama. Pentingnya kegiatan pemilu di Indonesia sendiri juga sudah tertulis dalam Undang-Undang, yaitu:

1. UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan aturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. UU No. 8 tahun 2015 perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
4. UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

b) Elemen (*Elements*)

Elemen merupakan bagian yang dibutuhkan dalam proses penyampaian pesan. Pesan yang ingin disampaikan kepada Masyarakat Kecamatan Bumiaji adalah pentingnya penggunaan hak pilih mereka dalam Pemilukada tahun 2017 untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji. Elemen yang dibutuhkan bagi masyarakat Kecamatan Bumiaji agar dapat menggunakan hak pilih mereka adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggal pelaksanaan Pemilukada Kota Batu tahun 2017

Waktu pelaksanaan Pemilukada Kota Batu merupakan pesan yang tidak kalah penting untuk disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji agar selalu ingat dan ikut berpartisipasi menyumbangkan suara mereka pada kegiatan pemilu. Tanggal pelaksanaan Pemilukada Kota Batu tahun 2017 adalah tanggal 15 Februari 2017.

2. Mengetahui syarat-syarat untuk menjadi DPT

Permasalahan pokok pada kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017 adalah mengenai data pemilih. Hal ini yang menjadi dasar kegiatan sosialisasi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berulang-ulang di berbagai wilayah di Kecamatan Bumiaji. Untuk menangani

permasalahan ini, KPU Batu juga melakukan kerjasama dengan Dispendukcapil Kota Batu dengan melakukan strategi jemput bola untuk validasi E-KTP dengan cara berkeliling wilayah Kecamatan Bumiaji menggunakan mobil. Hal lain yang wajib diperhatikan dalam kegiatan sosialisasi dan validasi DPT adalah cara penulisan nama DPT pada surat undangan pemilu, apakah ejaan nama, besar kecil huruf, dan terdaftar atau tidaknya nama tersebut dalam sistem sebagai daftar pemilih tetap.

3. Mengetahui kriteria suara sah dan tidak sah

Hal ini merupakan kesalahan sepele yang seringkali terjadi dan membingungkan masyarakat pada saat pemilu. Fokus sosialisasi KPU terkait hal ini adalah memberikan informasi mengenai berbagai macam variasi coblosan yang membuat suara menjadi sah dan tidak sah kepada masyarakat. Kegiatan ini biasa dilaksanakan bersamaan dengan simulasi pemilu di kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu.

c) Perlakuan (*Treatment*)

Merupakan cara pengemasan pesan sebelum disampaikan kepada *receiver*/penerima pesan. Cara komunikasi yang diterapkan KPU untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu di Kecamatan Bumiaji adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap struktur birokrasi pemerintah Kota Batu

Sosialisasi ini ditujukan kepada para aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan di Kecamatan Bumiaji. Sosialisasi ini biasa dilaksanakan bersamaan dengan bimtek terhadap aparatur pemerintah Kota Batu yang melibatkan seluruh staff pemerintahan, partai politik, jajaran Forkompinda, Panwaslu, dan media.

2. Sosialisasi terhadap struktur penyelenggara Pemilukada

Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh anggota KPU, PPK, PPS dan KPSS yang terlibat dalam agenda Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Sosialisasi ini dapat berupa rapat pleno, bimtek atau evaluasi rutin.

3. Sosialisasi terhadap masyarakat

Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bumiaji dan dilaksanakan di ruang publik yang ramai seperti: *car free day*, pasar-pasar tradisional, alun-alun, dan sebagainya. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan perhatian rakyat secara langsung dan efisien.

4. Sosialisasi kepada kelompok/organisasi bentukan masyarakat.

Sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan bantuan program Relawan Demokrasi bentukan KPU Batu. sasaran dari sosialisasi ini adalah kelompok pemilih pemula, difabel, perempuan, agama dan marginal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperoleh antusias masyarakat melalui komunitas/organisasi yang mereka ikuti.

d) Struktur (*Structure*)

Merujuk kepada struktur pesan yang telah ditata/disesuaikan dengan baik sesuai dengan golongan/kelompok masyarakat agar dapat menerima dan mengolah pesan lebih baik. Dalam hal ini, struktur pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji dapat dibedakan berdasarkan kelompok sasarannya. Adapun struktur dari pembagian pesan berdasarkan kelompok sasaran di Kecamatan Bumiaji dapat dilihat pada tabel berikut:

Agar lebih mudah memahami isi pesan yang diberikan kepada masing-masing kelompok di masyarakat Kecamatan Bumiaji, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ke dalam tabel struktur pesan kelompok sasaran. Adapun penyederhanaan isi pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Batu yang dibagi berdasarkan kelompoknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Struktur Pesan Kelompok Sasaran

No.	Kelompok	Pesan
1.	Struktur Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan teknis Pemilu • Tahapan pemilu
2.	Pemilih Pemula	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang Pemilu • Kesadaran mengenai hak pilih
3.	Difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis menggunakan hak pilih • Kesadaran mengenai hak pilih • Pengetahuan tentang Pemilu
4.	Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pesan bahwa golput itu 'haram', dan memberikan motivasi untuk menggunakan hak pilih

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Pemilu
5.	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan perempuan untuk memilih sesuai dengan kehendak mereka
6.	Marginal	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Pemilu
7.	Road show / Konvoi	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Pemilu damai

Sumber: Sumber: Hasil Wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, 2018.

Yang termasuk ke dalam kelompok struktur penyelenggara pemilu adalah seluruh staff pemerintahan, partai politik, jajaran Forkompinda, Panwaslu, dan media yang memiliki kewenangan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Proses penyampaian pesan terhadap kelompok ini mewajibkan pihak KPU Kota Batu diwajibkan untuk menetapkan agenda rutin berupa bimbingan teknis eksternal guna memaksimalkan proses sosialisasi Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Dikarenakan kesibukan dari masing-masing individu dalam kelompok ini cukup padat, maka agenda yang direncanakan harus matang dan telah diberikan undangan jauh hari sebelum kegiatan bimtek berlangsung.

Kelompok pemilih pemula di Kecamatan Bumiaji merupakan seluruh masyarakat yang berusia 17-21 tahun atau masyarakat yang baru pertama kali memperoleh hak sebagai DPT di Kecamatan Bumiaji. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Batu terhadap pemilih pemula dapat dilakukan pada 3 sekolah SMA/K yang berlokasi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pada kegiatan sosialisasi pemilukada Kota Batu tahun 2017, pihak KPU Kota Batu justru melewati ketiga sekolah tersebut dan justru mengadakan kegiatan sosialisasi pra-pemilih ke SDN 3

Gunungsari. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi pada agenda pemilu yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi kepada warga difabel di Kecamatan Bumiaji melibatkan Sembilan kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Bumiaji. Terdapat 58 warga berkebutuhan khusus yang tersebar di 9 kelurahan di Kecamatan Bumiaji dan telah terdaftar sebagai DPT pada pemilukada Kota Batu tahun 2017. Sosialisasi diberikan secara *door to door* melalui panitia/RT/RW setempat. Target sosialisasi ini tidak hanya melibatkan warga disabilitas, tetapi juga melibatkan seluruh keluarganya.

Kelompok agama dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu meliputi pemuka agama setempat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Pihak KPU menghimbau agar para pemuka agama tersebut bersedia untuk bekerjasama dengan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Pada umumnya pemuka agama tersebut akan bekerjasama dengan cara memberikan ceramah terkait pentingnya pemilu pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka ikuti atau mereka pimpin.

Pihak KPU Kota Batu memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan. Hal ini disebabkan karena suara/calon yang dipilih oleh kelompok ini masih banyak memperoleh pengaruh oleh pihak lain, seperti keluarga/suami. Pada kasus ini pihak KPU menghimbau pada kegiatan sosialisasinya kepada warga perempuan di Kecamatan Bumiaji yang berjumlah 22.177 orang agar memilih calon pasangan yang benar-

benar mereka anggap mampu menjadikan Kota Batu menjadi lebih baik lagi di masa depan.

Sedangkan kegiatan sosialisasi kepada kelompok marginal dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan atau berulang-ulang pada tempat yang berbeda. Tujuan dari kegiatan sosialisasi di berbagai tempat yang berbeda dan berulang-ulang ini adalah untuk menjangkau seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai DPT di seluruh Kota Batu. Adapun masyarakat Kota Batu yang telah terdaftar sebagai DPT di Kota Batu berjumlah 149.656 orang dan yang terdapat di Kecamatan Bumiaji sebanyak 44.114 orang.

Sosialisasi *road show*/konvoi dilaksanakan oleh KPU Kota Batu untuk seluruh kalangan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Tidak hanya masyarakat Kota Batu, wisatawan lokal dan mancanegara yang secara kebetulan berada di Kota Batu dan ikut menyaksikan kegiatan konvoi juga menjadi target sasaran sosialisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendeklarasikan pemilu damai kepada masyarakat luas bahwa kegiatan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batu.

e) Kode (*Code*)

Merupakan tanda/kata-kata yang digunakan KPU Kota Batu untuk menyampaikan pesan tertentu dalam bentuk yang berbeda. Contohnya adalah:

Pertama, slogan yang tertera dalam setiap *banner* sosialisasi KPU Kota Batu yang bertuliskan “Batu Ayo Memilih!” merupakan kode dari KPU

Kota Batu kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi dan masyarakat yang sempat melihat/membaca tulisan tersebut untuk menggunakan hak pilihnya pada kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Kedua, maskot Pemilukada Kota Batu tahun 2017 “Si Abat” yang memiliki tinta ungu pada jari kelingking sebelah kiri serta paku pada tangan sebelah kanan merupakan kode bagi masyarakat Kota Batu untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Ketiga, *Jingle* Pemilukada Kota Batu yang mengandung lirik berupa ajakan bagi masyarakat Kota Batu untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

5.1.3 Media (*Channel*)

Merupakan saluran penyampaian pesan yang dirumuskan oleh KPU Kota Batu kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji. Menurut David K. Berlo, efektif atau tidaknya saluran komunikasi dalam penyampaian pesan dapat dilihat melalui lima panca indera manusia. Akan tetapi tidak semua panca indera tersebut dapat dipergunakan dalam kegiatan penyampaian Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Terdapat tiga panca indera yang dipergunakan media dalam menyampaikan pesan kepada *receiver* pada Pemilukada Kota Batu tahun 2017 disertai tambahan *media partner* sebagai bentuk kerjasama KPU Kota Batu dengan berbagai media cetak, tv lokal dan massa, yaitu:

a) Penglihatan (*Seeing*)

Saluran komunikasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dan melibatkan indra penglihatan melibatkan seluruh agenda kegiatan yang berlangsung selama proses berlangsungnya Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Sedangkan *media partner* yang berkaitan dengan hal ini adalah televisi lokal, media cetak dan media massa. Warga difabel yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran dan fisik masih memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ia butuhkan melalui saluran komunikasi ini.

b) Pendengaran (*Hearing*)

Saluran komunikasi yang dipergunakan oleh KPU Kota Batu dalam Pemilukada tahun 2017 hampir semuanya melibatkan indra pendengaran. Saluran yang digunakan antara lain adalah komunikasi dua arah, pidato, orasi dan sebagainya. Sedangkan *media partner* yang berkaitan dengan hal ini adalah stasiun radio dan televisi lokal. Warga difabel yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan dan fisik masih memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ia butuhkan melalui saluran komunikasi ini.

c) Sentuhan (*Touching*)

Saluran komunikasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dan melibatkan indra sentuhan dalam agenda Pemilukada Kota Batu tahun 2017 dapat berupa brosur, pamflet, stiker, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan *media partner* yang berkaitan dengan hal ini adalah media cetak. Warga

difabel yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan dan pendengaran masih memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ia butuhkan.

d) *Media Partner*

KPU Kota Batu melakukan kerjasama dengan beberapa media yaitu media cetak (Harian Pagi Surya dan Malang Post Biro Batu), Media Radio (Radio Tidar Sakti dan RRI), Media Televisi lokal (Gajahyana TV, Agropolitan TV dan Batu TV). Sedangkan untuk penyampaian informasi melalui media massa *online* KPU menggunakan aplikasi berbasis website “SILON”, koran *online* “batutimes.com” dan website resmi KPU Batu di www.kpu-kotabatu.go.id.

5.1.4 Penerima Pesan (*Receiver*)

Penerima pesan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bumiaji Kota Batu, terutama bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih tetap dalam agenda Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Terdapat beberapa faktor dalam proses penerimaan pesan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji, yaitu:

a. Keterampilan Berkomunikasi (*Communication Skills*)

Merupakan kemampuan berkomunikasi dari penerima pesan. Kemampuan berkomunikasi mengarah kepada timbal balik dari masyarakat Kecamatan Bumiaji atas pesan yang telah diterima. Bagaimana kemampuan individu, kelompok atau lembaga untuk menanggapi pesan yang mereka terima dari kegiatan sosialisasi. Adapun kemampuan

berkomunikasi masyarakat Kecamatan Bumiaji selama proses sosialisasi adalah sebagai berikut:

Pertama, hampir seluruh masyarakat Kecamatan Bumiaji memperoleh pesan melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu. Meskipun mereka datang/mengikuti alur jalannya kegiatan, namun masih jarang adanya masukan, kritik dan saran dari mereka terhadap kinerja panitia sosialisasi. Mayoritas masyarakat masih bersikap pasif dalam penerimaan pesan dan jarang dari mereka yang bertanya meski kurang paham terhadap isi dari sosialisasi yang berlangsung.

Kedua, sosialisasi yang disampaikan kepada pejabat pemerintahan/para pemangku kepentingan yang menjabat di Kecamatan Bumiaji melalui bimtek eksternal yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi dan tempat yang telah ditentukan oleh KPU dinilai kurang maksimal. Respon yang didapat seringkali tidak terlalu baik, masih ada beberapa dari para pemangku kepentingan tersebut yang absen tanpa mengirimkan perwakilan mereka pada acara bimtek eksternal atau tidak menghadiri kegiatan bimtek eksternal dari awal hingga selesainya acara.

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

Diperlukan pengetahuan yang cukup bagi penerima pesan untuk mampu menangkap isi pesan yang disampaikan. Semakin rendahnya tingkat pengetahuan penerima pesan, maka semakin sulit untuk isi pesan tersampaikan. Hal ini ditanggapi oleh KPU dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkali-kali dengan tujuan masyarakat Kota Batu

mampu memahami dengan baik maksud serta isi pesan yang mereka sampaikan. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Bumiaji, tingkat pengetahuan masyarakat menjadi titik permasalahan terbesar yang mengakibatkan pesan dari panitia penyelenggara pemilukada sulit untuk sampai kepada mereka. Banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun perguruan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Bumiaji. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah SMA/perguruan tinggi di wilayah Batu terutama di Kecamatan Bumiaji. Terdapat sebagian kecil masyarakat memilih untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi di Kecamatan/Kota lain agar memperoleh pendidikan yang cukup bagi anak-anak mereka, akan tetapi mayoritas masyarakat Kecamatan Bumiaji yang memiliki mata pencaharian pokok dalam bidang pertanian lebih memilih untuk melanjutkan usaha mereka apabila dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan ke wilayah lain.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan masyarakat sulit untuk pro aktif dalam kegiatan pemerintahan seperti Pemilukada sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Bumiaji:

“Yang menghambat adalah kurangnya informasi pada masyarakat saja. Masyarakat mungkin kurang diajak pro aktif, sedangkan untuk yang lain-lain sepertinya tidak ada.”⁴³

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Sutanto Ketua PPK Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 26 Juni 2018.

Berdasarkan pernyataan Bapak Hari tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sebenarnya mampu untuk diajak bekerjasama dalam hal sosialisasi ataupun kegiatan pemilukada lainnya. Akan tetapi informasi yang diperoleh masyarakat Kecamatan Bumiaji belum maksimal, sehingga masyarakat masih belum bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Kejadian di lapangan sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Heri, masyarakat sudah diajak untuk pro-aktif selama kegiatan dan respon yang diterima seringkali tidak memuaskan. Mayoritas masyarakat cenderung menerima sosialisasi tanpa adanya proses timbal balik dalam bentuk pertanyaan, kritik dan saran. Setelah panitia melakukan wawancara pada beberapa masyarakat, ternyata tidak seluruh isi pesan mampu mereka pahami dan mereka lebih memilih untuk diam tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

Kurangnya kesadaran diri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kota Batu juga mampu disebabkan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kehidupan masyarakat Kota Batu hingga 5 tahun kedepan ditentukan dengan hasil akhir Pemilukada dan hanya masyarakat berpendidikan yang cukup mengerti akan pentingnya peran mereka dalam menggunakan hak suara mereka. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat juga akan ikut tinggi sebagaimana tanggapan wawancara dengan Mas Didik: *“Adanya kesadaran, kalau gak ada kesadaran dari masyarakat sendiri tidak akan setinggi itu partisipasi*

masyarakatnya.”⁴⁴ Kesadaran masyarakat Kecamatan Bumiaji tersebut yang menjadikan mereka sebagai warga Negara yang baik karena telah menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Dengan kesadaran yang tinggi pula, mereka akan lebih bersikap kooperatif terhadap seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu.

c. Sistem Sosial (*Social System*) dan Budaya (*culture*)

Sistem sosial di masyarakat dapat dilihat dalam keaktifan masyarakat tersebut dalam aspek sosial selama proses penerimaan pesan. Aspek-aspek sosial tersebut dapat berupa nilai-nilai, kepercayaan, budaya, agama dan pemahaman umum dalam masyarakat. Sedangkan pengertian dari budaya yang berkaitan dengan masyarakat Kecamatan Bumiaji adalah latar belakang dari masyarakat yang masih berada pada sistim sosial.

Perpaduan antara sistem sosial dan budaya yang dimaksud dapat berupa persamaan keyakinan umat beragama di Kecamatan Bumiaji secara mayoritas ataupun minoritas, adanya persamaan adat istiadat di Kecamatan Bumiaji dan beberapa budaya yang tidak jarang dijumpai pada masa pemilu. Persamaan keyakinan dan kebiasaan bertingkah laku dalam kegiatan sehari-hari menjadikan masyarakat lebih terbuka dalam proses penerimaan pesan selama proses sosialisasi berlangsung. Tetapi, ada pula

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Mas Didik Perwakilan Warga Difabel Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 26 Mei 2018.

kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan dan tetap berlangsung sehingga menjadi budaya yang buruk dalam masyarakat.

Pada kehidupan sehari-hari di masyarakat Bumiaji, terdapat nilai kekeluargaan yang sangat tinggi. Kehidupan bertetangga di Kecamatan Bumiaji sudah sangat erat dan akrab layaknya keluarga. Masyarakat Kecamatan Bumiaji akan berkumpul dan bekerja sama untuk membantu tetangga mereka apabila terdapat suatu peristiwa di lingkungan mereka, seperti: meninggalnya seseorang, adanya musibah yang terjadi di lingkungan, selamatan, kerja bakti, dan sebagainya. Tidak seperti kehidupan perkotaan yang seringkali tidak saling mengenal meskipun berada pada kompleks perumahan yang sama, berbeda dengan masyarakat Bumiaji yang saling mengenal satu sama lain meski berada pada RT/RW yang berbeda. Pada kegiatan sosialisasi dan pemilukada, kondisi seperti ini sangat membantu panitia pelaksana dalam mengumpulkan massa karena antara individu saling mengingatkan individu yang lain untuk ikut dalam agenda kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017.

Proses sosialisasi yang berlangsung di Kecamatan Bumiaji tidak hanya dilaksanakan oleh pihak KPU tetapi juga dilaksanakan oleh pihak calon pemilih ataupun partai yang menaunginya. Salah satu budaya yang dikatakan buruk tetapi seringkali terjadi dalam kegiatan sosialisasi di Bumiaji adalah adanya 'salam tempel', yaitu pemberian sejumlah uang dalam amplop yang diberikan kepada masyarakat oleh tim sukses atau partai agar masyarakat memilih pasangan calon yang mereka usung.

Praktik seperti ini sudah tidak terlalu banyak, tetapi masih ada beberapa pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut masih ada dan terjadi di Kecamatan Bumiaji. Budaya seperti ini secara agama ataupun moral tidak dapat dibenarkan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang memanfaatkan kondisi ini sebagai pemanis dalam kegiatan pemilu yang diadakan oleh pemerintah.

d. Sikap (*Attitudes*)

Merupakan sikap/tanggapan dari penerima pesan terhadap isi pesan yang telah disampaikan oleh pengirim pesan untuk diri sendiri, masyarakat atau lingkungan tempat ia tinggal. Sikap ini merupakan keputusan akhir dari penerima pesan untuk tindakan akhir yang akan ia lakukan setelah memperoleh pesan. Terdapat dua sikap yang dapat dilakukan oleh penerima pesan dalam Pemilukada Kota Batu tahun 2017, yaitu menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dilihat secara jelas melalui hasil Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Tercatat 149.656 warga Kota Batu memiliki hak pilih dalam pemilihan walikota. Untuk Kecamatan Bumiaji, jumlah DPT yang terdaftar sebanyak 44.114 orang. Akan tetapi tidak semua warga menggunakan hak pilihnya dan bersikap golput. Terbukti dari jumlah tersebut, hanya 38.056 warga Kecamatan Bumiaji yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Batu tahun 2017 dan sebanyak 6.058 warga Kecamatan Bumiaji tidak menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu.

Selain memiliki pilihan memilih dan tidak memilih dalam pemilukada, sikap lain yang ditunjukkan oleh masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam menanggapi proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu adalah mengajak teman dan keluarga untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilukada. Contoh ajakan yang mereka pelihatkan adalah pada saat mereka berangkat menuju TPS, mereka akan menanyakan apakah sudah melakukan pencoblosan pada saat melewati tetangga atau orang yang mereka kenal. Apabila orang tersebut menjawab belum, mereka pasti akan mengajak mereka untuk ikut berangkat bersama ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Sikap seupa lainnya dilakukan oleh LSM yang telah memberikan dukungan semangat ke KPU Kota Batu, mereka akan ikut membantu KPU dalam melakukan sosialisasi pada lingkungan mereka. Salah satu LSM yang paling berperan aktif dalam membantu KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah komunitas *Shining Batu*, komunitas yang beranggotakan masyarakat difabel ini membantu kinerja KPU Batu dengan cara melakukan sosialisasi secara swadaya kepada masyarakat Kecamatan Bumiaji secara *door to door* (dari pintu ke pintu).

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

5.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung strategi komunikasi KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang menjadi sumber keberhasilan tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji.

Adapun faktor pendukung tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji adalah:

a. Kemampuan Berkomunikasi dari Pengirim Pesan

Salah satu faktor pendukung proses komunikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu melalui kegiatan sosialisasi di Kecamatan Bumiaji adalah kemamuan berkomunikasi/kemampuan menyampaikan pesan (*communication skills*) yang dimiliki oleh KPU Kota Batu (*source*). Sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kota Batu yang terbentuk dalam kepanitiaan Pemilukada Kota Batu sebagai staff, PPK, PPS, KPPS dan relawan demokrasi telah menjadi sumber utama terwujudnya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Kecamatan Bumiaji. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Heri Ketua PPK Kecamatan Bumiaji yang mengakui kinerja KPU selama masa Pemilukada:

“Memang terjadi adanya peningkatan meskipun tidak signifikan. Di KPU sendiri membentuk adanya relawan demokrasi untuk sosialisasi yang mampu pro aktif melakukan pendekatan pada masyarakat dan terus menerus melakukan sosialisasi sampai dengan Pemilukada 2017 berlangsung.”⁴⁵

Pernyataan lain yang mendukung adanya kinerja panitia Pemilukada yang terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat adalah pernyataan dari Mbak Elva: “Karena informasi yang mudah diperoleh dan lingkungan kita mbak, karena disini kalau ada kegiatan pemilu gitu suka berangkat bersama-sama dan seringkali di TPS ramai musik atau heboh gitu jadi kita penasaran juga kan.”⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Sutanto Ketua PPK Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 26 Juni 2018.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Mbak Elva Andhika Septiasari Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 14 Juli 2018.

Kemampuan berkomunikasi dari KPU Kota Batu dan seluruh kepanitiaan yang terlibat dalam pemiluakada ditunjukkan melalui berbagai aktivitas sosialisasi, yaitu:

1. Sosialisasi DPT ke pusat perbelanjaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses sosialisasi terkait pengecekan DPT masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi di pusat keramaian dipercaya mampu memperoleh apresiasi masyarakat secara maksimal.
2. Melakukan kegiatan *on air* radio secara *live* dari kantor KPU Kota Batu. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi pemiluakada secara langsung dari pihak penyelenggara resmi, yaitu KPU Kota Batu.
3. Memperoleh perhatian warga dengan menghias TPS dan mengenakan *dresscode* unik. Kegiatan ini juga diiringi dengan pemutaran musik yang dianggap mampu membuat masyarakat tertarik dan tidak golput.
4. Melakukan pelayanan khusus perhadap DPT yang memiliki keterbatasan selama kegiatan pemilu berlangsung, seperti: pendampingan khusus pada DPT difabel, penyediaan TPS di lapas dan pelayanan khusus bagi DPT yang sedang berada di rumah sakit dan tidak bisa memilih di wilayah tempat tinggalnya.

Faktor pendukung kedua dari peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji adalah kelas sosial yang dimiliki oleh pengirim pesan. Adanya kelas sosial (*social system*) dari pengirim pesan ditunjukkan oleh calon pasangan walikota dan wakilnya juga ikut mengambil peran sebagai pengirim pesan (*source*)

dalam agenda kegiatan Pemilukada 2017. Setelah melalui proses pendaftaran dan pelantikan sebagai calon walikota dan wakil walikota, seluruh pasangan juga berhak untuk berperan sebagai pengirim pesan dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017. Pemenang dari Pemilukada Kota Batu tahun 2017 adalah pasangan Dewanti dan Punjul. Sistem sosial yang mereka miliki mampu mengalahkan ketiga calon pasangan lainnya. Faktor utama terpilihnya pasangan ini adalah latar belakang yang dimiliki oleh Ibu Dewanti selaku istri dari mantan walikota Batu pada periode sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari warga Kecamatan Bumiaji yang juga bertindak sebagai aktivis komunitas sosial *Shining Batu*, Mas Yusuf:

“Faktor utamanya ya suaminya mbak, suaminya kan dulu juga walikota Batu. Begitu suaminya turun, istrinya nyalon dan otomatis pihak yang dulunya mendukung suaminya juga ikutan mendukung bu dewanti ini juga. Pak Punjul juga punya latar belakang masyarakat biasa seperti kita-kita. Menurut berita, beliau dulu sempat jadi kernet dan tukang parkir. Tapi masih belum banyak warga yang tahu soal itu, yang paling kelihatan jelas ya Bu Dewanti itu mbak.”⁴⁷

Pasangan dari Ibu Dewanti juga ikut menyumbang suara dalam kemenangan mereka. Hal tersebut disebabkan karena persamaan latar belakang yang dimiliki oleh Bapak Punjul dengan sebagian besar masyarakat di Kota Batu. Mayoritas masyarakat di Kota Batu berasal dari golongan menengah ke bawah, dan Bapak Punjul merupakan salah satu di antaranya. Latar belakang beliau yang pernah bekerja sebagai tukang parkir hingga menjadi aktivis masyarakat memungkinkan masyarakat Batu untuk menaruh simpati lebih terhadap pasangan ini. Mengingat prestasi yang diperoleh suami Ibu Dewanti Rumpoko dan persamaan

⁴⁷ Hasil Wawancara oleh Yusuf Irawan Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018

latar belakang yang dimiliki oleh Bapak Punjul menjadi salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat di Kota Batu.

5.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat strategi komunikasi KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan faktor dari 6.058 masyarakat di Kecamatan Bumiaji tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor penghambat tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji adalah kemampuan berkomunikasi dari masyarakat. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya dimiliki oleh pengirim pesan, masyarakat juga wajib untuk memiliki kemampuan berkomunikasi (*communication skills*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan pesan dari masyarakat agar mampu menerima maksud/isi dari pesan yang disampaikan. Hal ini wajib diterapkan di Kecamatan Bumiaji yang mayoritas penduduknya memiliki kesibukan yang padat dan susah untuk memperoleh kegiatan sosialisasi karena terbatasnya waktu dan tempat yang tersedia.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPU sendiri terdiri dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, dengan tujuan pesan akan mampu disampaikan kepada seluruh masyarakat yang tidak sempat terlibat dalam salah satu atau lebih kegiatan sosialisasi. Pesan yang disampaikan pun tidak selalu melalui tatap muka, dapat berupa pesan elektronik dan media massa. Apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mencari atau mendapatkan informasi yang sudah disebarkan secara luas tersebut, maka akan sulit untuk mengurangi angka golput yang terjadi di Kecamatan Bumiaji.

Faktor penghambat yang kedua adalah pengetahuan yang dimiliki oleh penerima pesan. Kegiatan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Bumiaji ditemukan faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Bumiaji tidak menggunakan hak pilih mereka dalam kegiatan Pemilukada Kota Batu tahun 2017 yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilukada Kota Batu tahun 2017, sebagaimana hasil wawancara dengan Mas Yusup warga Kecamatan Bumiaji:

“Karena kesadaran masing-masing warga. Kalau mereka sadar akan pentingnya hasil pemilu itu nanti, mereka akan memakai hak pilihnya tanpa perlu disuruh. Sayangnya masih banyak yang kurang paham pentingnya milih saat pilkada.”⁴⁸

Pendapat lain yang juga mengatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Bumiaji masih kurang dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Mbak Yulis Sugiarti warga Kecamatan Bumiaji: “Karena kesadaran mereka kurang mbak, mereka masih belum paham saja kalau menggunakan hak pilih itu penting buat masa depan mereka sendiri.”⁴⁹ Pendapat serupa mengenai cara berfikir masyarakat yang kurang tepat juga diutarakan oleh Mas Didik melalui hasil wawancara: “Menurut aku sih cara pandang mereka yang masih menyepelekan pemilu. Karena mereka masih berpikiran kalau mereka masih bisa hidup tanpa adanya campur tangan pemerintah.”⁵⁰

⁴⁸ Loc.cit.

⁴⁹ Hasil Wawancara oleh Bu Yulis Sugiarti Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 24 Juli 2018.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Mas Didik Perwakilan Warga Difabel Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 26 Mei 2018.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi cara berpikir mereka. Kurangnya pengetahuan juga mengakibatkan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batu tidak cukup dilaksanakan dalam waktu sekali atau dua kali saja. Hal ini yang menyebabkan KPU melakukan kegiatan sosialisasi yang berbeda-beda untuk menciptakan sumber informasi dari berbagai golongan/kelompok guna memaksimalkan penyampaian pesan serta proses penerimaannya kepada masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Communication Skills* dan *Social System* yang dimiliki oleh KPU Kota Batu mampu menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bumiaji. Berkat kedua faktor tersebut, proses penyampaian pesan ke masyarakat menjadi lebih banyak dan lebih efisien sehingga masyarakat lebih mudah untuk memperoleh informasi terkait Pemilukada Kota Batu tahun 2017.
- b. *Treatment* dan *structure* pada *message* sangat membantu dalam pemahaman isi pesan. Karena pesan yang akan disampaikan disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan golongan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga proses penerimaan pesan akan tetap sama meskipun alur penyampaian pesannya berbeda.
- c. *Media partner* memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu. Seluruh media yang bekerja sama dengan KPU Kota Batu terbukti mampu menyalurkan pesan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi yang dapat diterima

dengan indera penglihatan (*seeing*), pendengaran (*hearing*) dan sentuhan (*touching*).

- d. *Social system, culture* dan *attitude* masyarakat Kecamatan Bumiaji sudah cukup baik sehingga mampu menerima informasi yang diberikan oleh *source* dan memperoleh tingkat partisipasi tertinggi di Kota Batu.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan guna kepentingan penelitian atau pengambilan kebijakan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Memperdalam *knowledge*/pengetahuan dari seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilukada terutama pengetahuan mengenai *culture*/kebudayaan masyarakat Kecamatan Bumiaji dan *attitude*/cara bersikap yang baik sehingga mampu mempertahankan prestasi yang diraih pada Pemilukada Kota Batu tahun 2017.
- b. Memperdalam *isi/content* serta *elemen/elements* pesan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kegiatan pemilukada serta melakukan inovasi secara rutin terkait *code/kode* yang akan ditunjukkan kepada masyarakat.
- c. Melakukan inovasi khusus terkait cara menyaluran pesan kepada masyarakat yang nantinya bisa dirasakan melalui indera penciuman/*smelling* atau bahkan pengecap/*taste*.
- d. memberikan pelatihan dini kepada kelompok pra-pemilih guna mengantisipasi adanya kekurangan pada kemampuan

berkomunikasi/*communication* *skills* DPT ataupun
pengetahuan/*knowledge* pemilu DPT.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antar, Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks.
- Arifin, Anwar. 2003. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Nusantara
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Harun, Rochajat dan Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moy, P., Mazzoleni, G., and Rojas, H.. "On the Dichotomies of Political Communication" In the International Journal of Communication.
- Muller, Johaness. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rochaety E, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rush & Philip Althoff. 1998. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugito, Yogi. 2011. *Metode Penelitian (Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah)*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid S. 1989. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Antar Kota.

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thoifah, I' anatut. 2015. *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani.
- Wijaksono, Sigit. 2013. *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*. Jurnal ComTech Vol. 4 No. 1.
- Y. Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

WEBSITE

- Dasyo, Anita Maryati. 2015. *Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya Menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017*. Skripsi diakses tanggal 24 Mei 2018, 20:16 WIB.
- Data Partisipasi Masyarakat Kota Batu Tahun 2007 [diunduh 11 Maret 2018]. Tersedia dari: <http://kpu-kotabatu.go.id/statis-28-Pilkada2007.html>
- Data Partisipasi Masyarakat Kota Batu tahun 2012 [diunduh 11 Maret 2018]. Tersedia dari: <http://kpu-kotabatu.go.id/statis-29-pilkada2012.html>
- Data Pemilih Tetap Kota Batu tahun 2017 [diunduh 13 Mei 2018]. Tersedia dari: <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/>
- Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias. 2017. *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi*. Jurnal Kajian Komunikasi diakses tanggal 17 Desember 2018, 13:03 WIB.
- Hutomo, Ridho Satrio. 2015. *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*. Skripsi diakses tanggal 27 Mei 2018, 08:55 WIB.
- Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2017 [diunduh 10 Juli 2018]. Tersedia dari: <https://batukota.bps.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, "Struktur Organisasi", diakses melalui <https://kpu-kotabatu.go.id/struktur-organisasi/> pada 3 Juli 2018 pkl. 19.10 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, "Visi dan Misi", diakses melalui <https://kpu-kotabatu.go.id/visi-dan-misi/#misi> pada 2 Juli 2018 pkl. 18.16 WIB.
- Maysagita, Afandi Mu'in. 2014. *Strategi Komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten Magetan dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan yang Kondusif tahun 2013*. Skripsi diakses tanggal 25 Mei 2018, 19:46 WIB.

- Nurali. 2015. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli*. Skripsi diakses tanggal 16 Mei 2018, 19:46 WIB.
- Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran* [diunduh 17 Februari 2018]. Tersedia dari: <http://seknasfitra.org>
- Putri, Maslekeh Pratama. 2016. *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. Skripsi diakses tanggal 24 Mei 2018, 19:46 WIB.
- Putri, Nur Antika Agustin. 2017. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015*. Skripsi diakses tanggal 24 Mei 2018, 21:21 WIB.
- Utami, Afrina Wahyu. 2016. *Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015*. Skripsi diakses tanggal 27 Mei 2018, 09:12 WIB.
- Wensik, Erick. 2013. *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE – Drs. Koni Ismail Siregar pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010)*. Skripsi diakses tanggal 24 Mei 2018, 20:34 WIB.

PERATURAN

- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
- UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan aturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- UU No. 8 tahun 2015 perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

WAWANCARA

Wawancara dengan Bu Rochani, selaku Ketua KPU Kota Batu tanggal 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Mas Yusuf Irawan, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 24 Juli 2018.

Wawancara dengan Bu Yulis Sugiarti, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 24 Juli 2018.

Wawancara dengan Pak Syoni Kuncoro, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 24 Juli 2018.

Wawancara dengan Mbak Riska Ardiyanti, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 24 Juli 2018.

Wawancara dengan Bapak Heri Sutanto, selaku Ketua PPK Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 26 Juni 2018.

Wawancara dengan Mas Didik, selaku Pembina Komunitas Difabel Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 26 Mei 2018.

Wawancara dengan Pak Suwarno, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 11 Juli 2018.

Wawancara dengan Mbak Elva, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 14 Juli 2018.

Wawancara dengan Bu Suhartatik, Warga Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 14 Juli 2018.

Wawancara dengan Pak Dani, selaku Wartawan dari Malang Post tanggal 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Mbak Pungky, selaku Wartawan dari Gajahyana TV tanggal 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Mas Beny, selaku wartawan dari BPS TV tanggal 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Bu Santi Eliana, Penyiar dari Radio Tidar Sakti tanggal 14 Maret 2018.